



LAPORAN KINERJA

(LAKIP)
TAHUN 2025



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIKKA
202**

KATA PENGANTAR

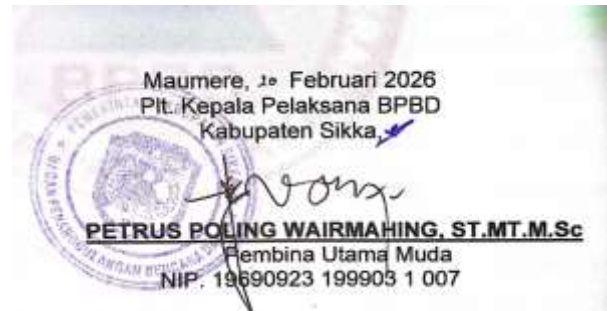
Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka merupakan suatu pertanggungjawaban formal atas capaian kinerja, target dan penggunaan anggaran Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahun. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka berkewajiban menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta atas penggunaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka selama tahun 2025.

Laporan kinerja ini disusun sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan secara teknis penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman penyusunan Laporan Kinerja ini untuk Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sikka mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka.

Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target Kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tahun 2025. Secara umum sasaran yang direncanakan tahun 2025 dapat terealisasi dengan cukup baik atas dukungan seluruh aparatur di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki penilaian kinerja maupun pemeringkatan

kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka di masa yang akan datang.





Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dimaksudkan untuk menginformasikan capaian kinerja tahun 2025 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Capaian kinerja ini menggunakan tolok ukur pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 yang merupakan komitmen penuh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka untuk menjalankan kinerja yang optimal sebagai bagian dari upaya pemenuhan misi Penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 - 2029.

LAKIP Tahun 2025 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 adalah dokumen evaluasi untuk mencapai peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Pencapaian masing-masing sasaran dari target yang direncanakan dalam tahun 2025 tidak lepas dari berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Untuk menghadapi semua kendala tersebut dibutuhkan keseriusan dalam proses perencanaan dengan pertanggungjawaban sehingga mampu memenuhi target yang ditetapkan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi sebagai berikut :

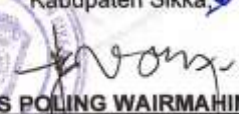
1. Belum tersedianya dana untuk pembangunan gudang logistik dan garasi kendaraan;
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang siaga bencana;
3. Masih kurangnya koordinasi lintas sektor;
4. Kurangnya SDM dan fasilitas pendukung;

5. Kurang sigapnya aparat desa maupun kecamatan dalam memberikan laporan tentang bencana;
6. Perlu koordinasi lintas sektor;
7. Kurangnya SDM dalam melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana (Tenaga Teknis);
8. Perlu adanya rapat koordinasi berkaitan dengan darurat bencana dan pasca bencana;

Tahun 2025, Fokus kegiatan yang perlu dilakukan berupa tindakan perbaikan sebagai berikut:

- a. Perlu adanya sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan bencana;
- b. Peningkatan koordinasi dalam penyusunan serta perencanaan dalam mencegah dan menanggulangi bencana;
- c. Melakukan ikatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan strategi dalam penanggulangan bencana baik pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana;
- d. Peningkatan perlindungan dan pemulihan akibat dampak bencana;
- e. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam.

Akhir kata, semoga LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada masa yang akan datang.

Maumere, 10 Februari 2026
Pit. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Sikka,

PETRUS POLING WAIRMAHING, ST.MT.M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 19690923 199903 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	1
1.1.1 Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	1
1.1.2 Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2
1.1.3 Wewenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	2
1.2 Aspek Strategis Organisasi.....	3
1.3 Struktur Organisasi.....	8
1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	20
1.5 Sistematika Penyajian	22
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	24
2.1 Dokumen Perencanaan Tahun 2024-2026.....	24
2.1.1 Dokumen Renstra BPBD Tahun 2024-2026	24
2.1.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026	28
2.1.3 Rencana Kinerja Tahun Perubahan BPBD Tahun 2025.....	34
2.1.4 Perjanjian Kinerja Perubahan BPBD Tahun 2025	35
2.1.5 Keselarasan IKU BPBD Tahun 2025 Pada Renstra 2024-2026..	37
2.2 Dokumen Perencanaan Tahun 2025-2029.....	38
2.2.1 Dokumen Renstra BPBD Tahun 2025-2029	38
2.2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029	46
2.2.3 Rencana Kinerja Tahun Perubahan BPBD Tahun 2025.....	55
2.2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan BPBD Tahun 2025	56
2.2.5 Keselarasan IKU BPBD Tahun 2025 Pada Renstra Tahun 2025-2029	58

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	60
3.1 Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Kabupaten Sikka	60
3.1.1 Analisis Sesuai IKU 2025 Berpedoman Dokumen Renstra	
BPBD Pada Dokumen Renstra BPBD Tahun 2024-2026.....	60
3.1.2 Analisis Sesuai IKU 2025 Berpedoman Pada Renstra	
Tahun 2025-2029.....	72
3.2 Realisasi Anggaran	88
BAB IV PENUTUP	140
4.1 Kesimpulan	140
4.2 Saran	140

Lampiran:

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
3. Cascading Perangkat Daerah Tahun Tahun 2025.
4. Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2025, terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah.
 - b. Kepala Bidang / Sekretaris atau setara Eselon III.
 - c. Kepala Sub Bidang atau setara Eselon IV.
 - d. Jabatan Fungsional Tertentu.
 - e. Pejabat Pelaksana.
5. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2025.
6. Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
7. Realisasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
8. Penghargaan-penghargaan yang diperoleh baik lokal/nasional/internasional pada tahun 2025 (Narasi dan penghargaan).

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Status Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.....	3
Tabel 1.2	Tingkat Pendidikan ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.....	3
Tabel 1.3	Jenjang Pendidikan/Golongan ASN Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.....	4
Tabel 1.4	Diklat PIM ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.....	6
Tabel 1.5	Jabatan Struktural dan Fungsional ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.....	6
Tabel 1.6	Kondisi Sarana dan Prasarana.....	7
Tabel 1.7	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rutin Yang Dilakukan BPBD Tahun 2025.....	21
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran BPBD Renstra Tahun 2024-2026.....	27
Tabel 2.2	Indeks Kinerja Utama BPBD Tahun 2024-2026.....	29
Tabel 2.3	Target Tahunan IKU BPBD Tahun 2024-2026.....	33
Tabel 2.4	Rincian Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kalaksa BPBD Kabupaten Sikka.....	34
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	35
Tabel 2.6	Keselarasan IKU BPBD Tahun 2025 pada Renstra 2025-2029.....	38
Tabel 2.7	Tujuan dan Sasaran BPBD Renstra Tahun 2025-2029.....	41
Tabel 2.8	Stategis BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029.....	44
Tabel 2.9	Arah Kebijakan BPBD Tahun 2025-2029.....	45
Tabel 2.10	IKU BPBD Tahun 2025.....	47

Tabel 2.11	Target Tahunan IKU BPBD Tahun 2025 Pada Renstra Tahun 2025-2029.....	54
Tabel 2.12	Rencana Kerja Tahun 2025 Kalaksa BPBD.....	55
Tabel 2.13	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	56
Tabel 2.14	Keselarasan IKU BPBD Tahun 2025 Pada Renstra BPBD Tahun 2025-2029.....	59
Tabel 3.1	Analisis Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Pada Tahun 2025.....	61
Tabel 3.2	Analisi Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025,2024 dan 2023.....	62
Tabel 3.3	Analisi Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Terdapat Pada Renstra BPBD Tahun 2024-2026.....	64
Tabel 3.4	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan SPM...	66
Tabel 3.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.....	68
Tabel 3.6	Analisis Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	71
Tabel 3.7	Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan 2024..	74
Tabel 3.8	Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Terhadap Pada Renstra BPBD Tahun 2025-2029...	76
Tabel 3.9	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan SPM....	78
Tabel 3.10	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan.....	79
Tabel 3.11	Evaluasi HasilnRenja BPBD Tahun 2025.....	84
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran.....	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.....	8
------------	---	---





BAB I

PENDAHULUAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pembagian tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, sebagai berikut :

1.1. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.1.1 Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi akibat bencana secara adil dan merata;
- b) Merumuskan, menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e) Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulangan bencana;
- f) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan, dan pengembangan informasi peta rawan bencana;

- g) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana;
- h) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- i) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- j) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- k) Menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
- l) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- m) Mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
- n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas.

1.1.2 Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b) Pengoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c) Pengelolaan urusan ketatausahaan.

1.1.3 Wewenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kewenangan:

- a) Penetapan kebijakan Daerah bidang penanggulangan bencana;
- b) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- c) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- d) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPBD Kabupaten Sikka didukung oleh sumber daya organisasi, yang terdiri dari sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana.

a. Sumber Daya Aparatur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 38 orang yang terdiri dari Kepala Pelaksana yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, dengan jumlah pegawai seluruhnya baik ASN maupun Tenaga Honorer sebanyak 38 orang, terdiri dari PNS sebanyak 22 orang PPPK 11 Orang, CPNS 4 Orang dan PPPK paru waktu sebanyak 1 orang.

Tabel 1.1
Status Kepegawaian BPBD Kabupaten Sikka

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PNS	14	8	22
2	PPPK	10	1	11
3	CPNSD	2	2	4
4	PPPK Paru Waktu	1	-	1
Jumlah		27	11	38

Sumber: Olahan BPBD Tahun 2025

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dari 38 orang pegawai Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari PNS sebanyak 22 orang atau 57,89%, PPPK sebanyak 11 orang atau 28,94%, CPNS sebanyak 4 orang atau 10,52% dan 1 orang merupakan PPPK paru waktu atau 2,63%, sedangkan berdasarkan jenis kelamin, terdapat 27 orang atau 71,05% berjenis kelamin laki-laki dan 11 orang atau 28,94% berjenis kelamin perempuan. Per posisi tanggal 31 Desember 2025, jumlah aparatur sipil negara (ASN) pada BPBD Kabupaten Sikka tercatat sebanyak 36 orang.

Dari jumlah tersebut, terdapat pengurangan pegawai yang disebabkan oleh 1 (satu) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang memasuki masa pensiun. Sumber daya aparatur merupakan faktor paling krusial dalam organisasi pemerintahan daerah. Untuk menjawab tantangan dan tuntutan pelayanan publik di era globalisasi, aparatur dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui proses pembelajaran berkelanjutan. Oleh karena itu, tingkat pendidikan ASN menjadi indikator penting dalam menggambarkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah. Berikut data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan ASN BPBD Kabupaten Sikka

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SD	1
2.	SLTP	1
3.	SLTA	15
4.	DIII	4
5.	S1	15
	Jumlah	36

Sumber: Olahan BPBD Kab. Sikka 2025

Kualifikasi Pendidikan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari pegawai yang berpendidikan SD 1 Orang, SLTP 1 orang, SLTA 15 Orang, Diploma III 4 Orang dan 15 Orang berpendidikan sarjana.

ASN dalam struktur birokrasi memiliki jenjang pangkat dan golongan yang mencerminkan tingkat tanggung jawab, pengalaman, dan kompetensi yang dimiliki. Sistem pangkat ini bersifat berjenjang dan digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan karier, penggajian, serta pembinaan pegawai. ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.3.

Jenjang Pangkat/Golongan ASN BPBD Kabupaten Sikka

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
A.	PNS	24
1	Pembina Utama Muda/IV c	1
2	Pembina Tingkat /IV b	-
3	Pembina/IV a	3
4	Penata Tingkat I/III d	7
5	Penata/III c	-
6	Penata Muda Tingkat I/III b	-
7	Penata Muda/III a	9
8	Pengatur Tingkat I /II d	-
9	Pengatur /II c	3
10.	Pengatur Muda/II a	1
B	PPPK	11
1	Golongan IX	1
2	Golongan VII	1
3	Golongan V	9
C	PPPK Paru Waktu	1
1	Golongan V	1
	Jumlah	36

Sumber : Olahan BPBD Kab. Sikka 2025

Penyebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dilihat dari golongan/pangkat dapat dijelaskan sebagai berikut: 4 orang Golongan IV, 16 orang Golongan III, 4 orang Golongan II dan 1 orang dengan golongan IX, 1 orang Golongan VII, dan 10 orang Golongan V.

Diklat Kepemimpinan (Diklat PIM) merupakan salah satu bentuk pendidikan dan pelatihan struktural yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, serta membentuk sikap dan perilaku kepemimpinan aparatur. Pelaksanaan Diklat PIM ditujukan agar aparatur pemerintah dapat memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang didudukinya. Dengan mengikuti Diklat PIM, seorang pejabat struktural diharapkan mampu mengembangkan karakter kepemimpinan yang sesuai dengan level jabatannya, sehingga dapat menjalankan fungsi manajerial, pengendalian, dan pengambilan keputusan secara efektif dalam rangka mendukung kinerja organisasi pemerintahan. Berikut data Diklat PIM ASN Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka:

Tabel 1.4
Diklat PIM ASN BPBD Kabupaten Sikka

No.	Uraian	ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	ASN Yang belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan
1	PIM II	-	1
2	PIM III	-	4
3	PIM IV	4	2
	Jumlah	4	7

Sumber : Olahan BPBD Kab. Sikka 2025

Jumlah Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari Jabatan Struktural Eselon II-B 1 orang, Eselon III-B 4 orang, Eselon IV-A 1 orang, Jabatan Fungsional Tertentu 11 orang yang terdiri dari Analis Kebencanaan 2 orang, Penata Penanggulangan Bencana 3 orang, Perencana 2 orang, dan Fungsional Umum 10 orang. secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 1.5
Jabatan Struktural dan Fungsional ASN
BPBD Kabupaten Sikka

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
A.	Struktural			
1	Eselon II-B	1	1	-
2	Eselon III-B	4	3	1
3	Eselon IV-A	1	-	1
B.	Fungsional			
	Analis Kebencanaan	1	1	-
	Penata Penanggulangan Bencana	3	1	2
	Perencana	3	1	2
	Penatalaksana barang kantor	2	1	1
	Analisis Bencana Ahli pertama	2	1	1
	Fungsional Umum	7	5	2
C.	PPPK	12	11	1
	Jumlah :	36	22	11

Sumber : Olahan BPBD Kab. Sikka 2025

b. Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Benacana Daerah Kabupaten Sikka ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana tersebut meliputi ruang kerja, peralatan kerja, sarana telekomunikasi, serta sarana transportasi yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi.

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang tersedia dapat dikatakan cukup memadai, namun masih terdapat kebutuhan untuk peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, agar lebih optimal dalam mendukung kinerja organisasi. Upaya peningkatan sarana dan prasarana diperlukan untuk memperlancar koordinasi, memperkuat dukungan teknis, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas perencanaan, penelitian, dan inovasi daerah.

Secara lebih rinci, jenis dan jumlah sarana prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Benacana Daerah Kabupaten Sikka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6
Kondisi Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
1	Ruang Kerja	7 Ruang	Baik
	Bangunan Gedung	2 Unit	Rusak ringan
2	Gedung pertemuan permanent / ruang rapat	1 Ruang	Rusak ringan
3	Gudang tertutup permanent	1 Unit	Baik
4	Gedung garasi/pool permanent	1 Unit	Rusak ringan
5	Kendaraan Roda 6	2 Unit	1 Baik, 1 rusak ringan
6	Kendaraan Roda 4	5 Unit	4 baik, 1 rusak berat
7	Kendaraan Roda 2	2 Unit	Baik
6	Speedboat	1 Unit	Rusak ringan
8	Mesin Sensor	2 Unit	Baik
9	Televisi	1 Unit	Rusak ringan
10	Mesin Generator	2 Unit	Rusak ringan
11	AC	7 Unit	Baik
12	Komputer PC	1 Unit	Baik
13	Printer	7 Unit	5 baik, 2 rusak ringan
14	LCD Proyektor	1 Unit	Baik
15	Laptop	7 Unit	5 baik, 2 rusak ringan
16	Kamera	2 Unit	Rusak berat
17	EWS (Early Warning System)	1 Paket	Baik
18	Perahu Karet	2 Unit	Baik

No	Uraian	Jumlah	Kondisi
19	Sumur Gali	1 Unit	Rusak ringan
20	Motor Trail	9 Unit	8 baik, 1 rusak berat

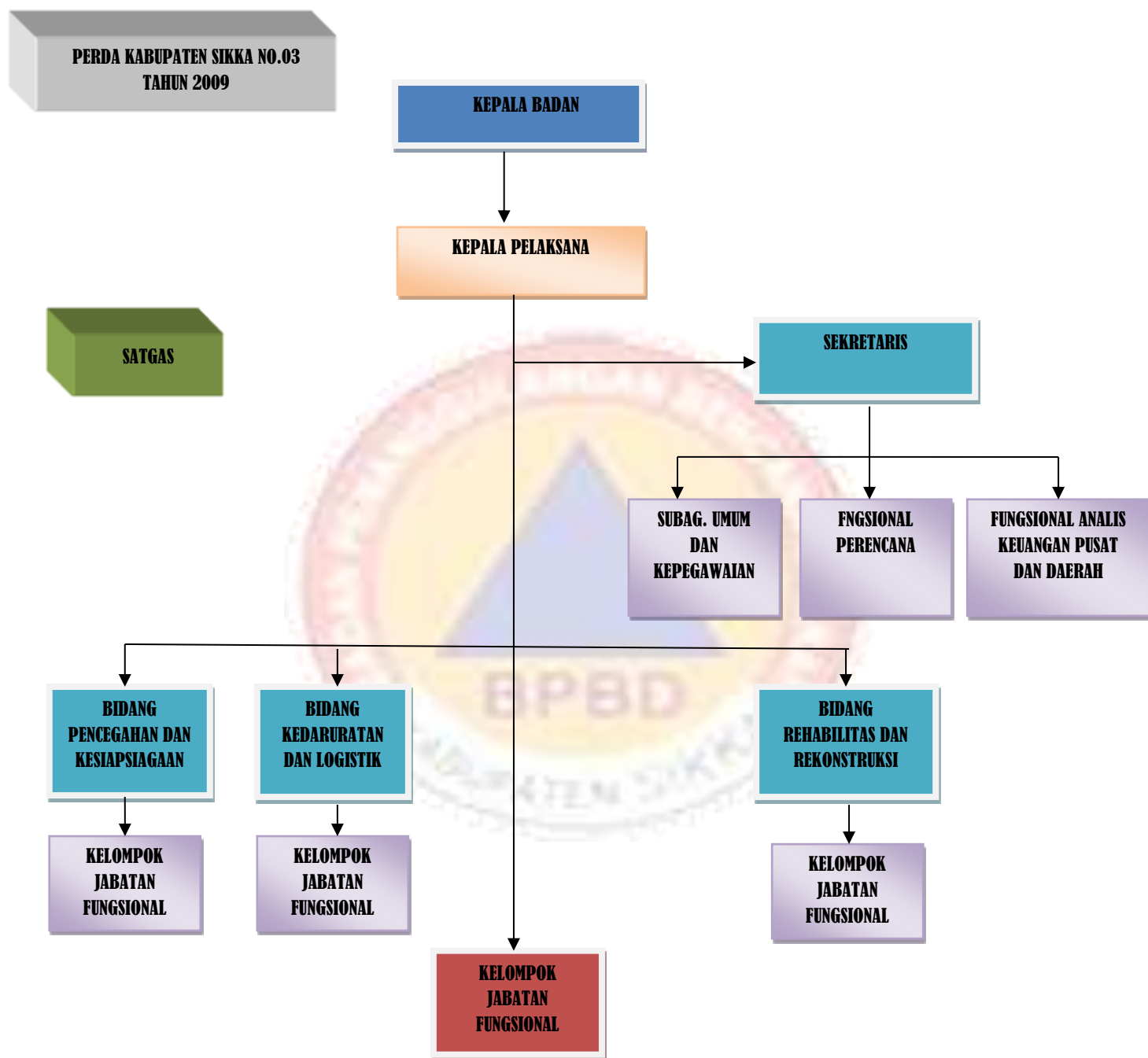
Sumber : Olahan BPBD Kabupaten Sikka, 2025

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka sampai dengan saat ini belum memiliki gedung kantor dan garasi mobil yang memadai. Gedung kantor yang dipakai sekarang adalah milik Dinas Sosial Kabupaten Sikka, dan garasi yang ada sekarang hanya dapat memuat kendaraan roda dua. Secara keseluruhan sarana prasarana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka belum mendukung kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 10 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sakit Umum daerah, Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dengan struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka



Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan unsur pelaksana bidang Penanggulangan Bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sikka melalui Sekretaris Daerah selaku *ex.Officio* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Pembagian tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, sebagai berikut:

a) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana.

Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Secara rinci uraian tugas pengarah badan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi bencana daerah.
2. Menganalisa dan pengembangan informasi peristiwa bencana daerah.
3. Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi penanggulangan bencana daerah.
4. Menghimpun dan menginventarisasi kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
5. Merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan teknologi penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
6. Merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana daerah.
7. Merumuskan dan menyusun konsep kerja sama penanganan dan penanggulangan bencana daerah
8. Memantau dan mengevaluasi efektifitas kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
9. Memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

b) Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana

Unsur pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka menyelenggarakan fungsi pengordinasian, pengkomandoan, dan pelaksana. Pada fungsi koordinasi unsur pelaksana melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan paskabencana. Untuk fungsi komando, unsur pelaksana melaksanakan komando dalam mengorganisir sumber daya manusia, peralatan, logistik, yang ada pada perangkat daerah lain, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain serta langka-langka yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Sedangkan untuk fungsi pelaksana dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan perundang-undangan. Unsur pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari:

1. Kepala Pelaksana;

Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Secara rinci uraian tugas kepala pelaksana penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut;

- a) Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana;
- b) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana;
- c) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana;
- d) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana;
- e) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;

- f) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- g) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana;
- h) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dan penanggulangan bencana;
- i) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat;
- j) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan bencana;
- k) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana;
- l) Mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana;
- m) Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- n) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang

meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b) Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c) Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
- d) Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- f) Sekretariat terdiri dari:

2.1. Sekretaris

Tugas Sekretaris adalah membantu Kepala Pelaksana dalam merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program, keuangan, evaluasi dan pelaporan serta Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Kesekretariatan serta pengajuan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b) Mengoordinasikan para Kepala Bidang dan Sub Bidang dalam penyelenggaraan penyusunan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c) Menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran;
- d) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- e) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- f) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- g) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- h) Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan serta
- i) pengelolaan administrasi kepegawaian;
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Umum, Kepegawaian, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun program dan rencana kegiatan Umum dan Kepegawaian;

- b) Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Umum, dan Kepegawaian lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c) Mendistribusikan tugas kepada pelaksana pada urusan Umum dan Kepegawaian;
- d) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
- e) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris;
- f) Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
- g) Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
- h) Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

2.3. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Pejabat Fungsional Perencana

Tugas Pejabat Fungsional Perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun rencana program dan kegiatan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Mendistribusikan tugas kepada pelaksana pada urusan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris;

6. Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
7. Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
8. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

Pejabat fungsional perencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, terdiri dari, perencana ahli pertama, perencana ahli muda dan dibantu oleh perencana (PPPK) dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Perencana Ahli Pertama,
 - a. mengidentifikasi permasalahan;
 - b. merumuskan permasalahan;
 - c. inventarisasi dan identifikasi data sekunder;
 - d. inventarisasi dan identifikasi data primer;
 - e. mengolah data dan informasi;
 - f. mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data;
 - g. menganalisis data dan informasi;
 - h. menyajikan data dan informasi;
 - i. melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana;
 - j. melakukan persiapan evaluasi rencana pembangunan tahunan;
 - k. mengolah data dan informasi dalam rangka evaluasi rencana pembangunan tahunan.
2. Perencana Ahli Muda
 - a. memformulasikan sajian untuk analisis;
 - b. melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
 - c. menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
 - d. menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
 - e. menguji alternatif kriteria dan model;
 - f. menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;

- g. menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
 - h. menyusun perencanaan program dan kegiatan regional;
 - i. menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
 - j. menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
 - k. melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif;
 - l. mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
 - m. rencana pembangunan
- b. Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
- Tugas Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah adalah menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan Keuangan dan Perlengkapan, dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun program dan rencana kegiatan Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Keuangan dan Perlengkapan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Mendistribusikan tugas kepada pelaksana pada urusan Keuangan dan Perlengkapan;
 - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris.
 - f. Pejabat fungsional analisis keuangan pusat dan daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka, saat ini masih lowong dan belum terisi sejak pejabat yang lama memasuki masa pensiun.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah unsur pelaksana teknis pencegahan dan kesiapsiagaan yang mempunyai tugas merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Mengoordinasikan kelompok jabatan fungsional pada bidang dalam rangka penyelenggaraan administrasi;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Mendistribusikan tugas kepada para pejabat fungsional;
- e. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Menyenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
- h. Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
- i. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah unsur pelaksana teknis kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kedaruratan dan logistik, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. Mengoordinasikan kelompok jabatan fungsional dalam rangka penyelenggaraan administrasi;
- c. Melaksanakan koordinasi kegiatan Bidang kedaruratan dan logistik;

- d. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Bidang kedaruratan dan logistik;
- e. Mendistribusikan tugas kepada para pejabat fungsional;
- f. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
- i. Melaksanakan penilaian prestasi kerja;
- j. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi adalah unsur pelaksana teknis dalam merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. Mengoordinasikan para pejabat fungsional pada bidang dalam rangka penyelenggaraan administrasi;
- c. Melaksanakan koordinasi kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Mendistribusikan tugas kepada para Pejabat Fungsional;
- f. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan tugas;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Menyelenggarakan rapat staf dalam rangka peningkatan kinerja;
- i. Melaksanakan penilaian prestasi kerja;

- j. Melaksanakan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

6. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi teknis dalam kelancaran pelaksanaan organisasi Penanggulangan bencana daerah. Jabatan Fungsional termasuk hasil penyetaraan dari jabatan struktural pengawas yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam bidang masing-masing dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun antar perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka terdiri dari:

a. Analis Kebencanaan

Fungsional analis kebencanaan adalah fungsional yang melaksanakan analisis penanggulangan bencana. Tugas Jabatan Fungsional Analis kebencanaan dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan meliputi analisis kebencanaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyuluhan kebencanaan dan pengembangan strategi kebencanaan.

Ruang lingkup kegiatan analisis kebencanaan pada setiap jenjang jabatan meliputi:

- 1) Analis Kebencanaan Ahli Pertama melaksanakan inventarisasi dan kebencanaan, identifikasi penyelenggaraan bahan analisis penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan;
- 2) Analis Kebencanaan Ahli Muda melaksanakan analisis kebencanaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan; -
- 3) Analis Kebencanaan Ahli Madya melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan rekomendasi analisis kebencanaan, penanggulangan kebencanaan; dan bencana penyelenggaraan dan penyuluhan

- 4) Analis Kebencanaan Ahli Utama melaksanakan penyusunan, pengembangan strategi dan kebijakan di bidang penanggulangan bencana

b. Pranata Kebencanaan

Tugas Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan yaitu melaksanakan kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan meliputi teknis kegiatan

operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan. Ruang lingkup kegiatan pada setiap jenjang jabatan meliputi:

- 1) Pranata Kebencanaan pemula melaksanakan identifikasi kebutuhan kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan;
- 2) Pranata Kebencanaan terampil melakukan pengumpulan data dan pemetaan kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan;
- 3) Pranata Kebencanaan mahir melaksanakan kegiatan operasional dan penanggulangan kebencanaan; dan teknis bencana penyelenggaraan dan penyuluhan
- 4) Pranata Kebencanaan penyelia melakukan evaluasi dan penyusunan rekomendasi kegiatan operasional dan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyuluhan kebencanaan.
- 5) Selain tugas tersebut di atas, Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan dan Jabatan Fungsional Pranata Kebencanaan dapat diberikan tugas lainnya oleh pimpinan.

7. Satuan tugas

Satuan tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana.

1.4. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program yang dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) kegiatan dan 20 (dua puluh) subkegiatan. Program dan kegiatan tersebut merupakan program rutin yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Program Kegiatan dan Sub kegiatan rutin yang dilaksanakan
BPBD Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.990.532.539	2.599.047.019
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.851.400	19.373.200
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.851.400	19.373.200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.228.030.560	1.951.761.091
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.145.242.560	1.877.073.091
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	82.788.000	74.688.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.679.500	133.513.500
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.976.600	1.712.700
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.952.900	7.584.600
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.920.000	10.500.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.850.000	6.751.200
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	151.980.000	106.965.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	34.343.400	14.338.800
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	11.924.800	0,00
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.418.600	14.338.800
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.445.796	92.434.848
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.960.608	63.944.860
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	32.485.188	28.489.988
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	445.181.880	387.625.580
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	420.342.480	378.025.580
	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	10.800.000	9.600.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.039.400	0,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
B	Program Penanggulangan Bencana	557.398.700	516.329.400
	Pelayanan Informasih Rawan Bencana kabupaten / kota	103.770.000	156.823.100
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasih dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	103.770.000	61.562.600
	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	0,00	95.260.500
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	321.906.200	271.328.100
	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	192.228.300	198.073.700
	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	129.677.900	73.254.400
	Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana	131.722.500	88.178.200
	Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	131.722.500	88.178.200
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA	3.543.931.236	3.115.376.419

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Kata Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Daftar Isi
4. Daftar Tabel
5. Daftar Gambar
6. Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi
 - 1.2 Aspek Strategis Organisasi
 - 1.3 Struktur Organisasi
 - 1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
 - 1.5 Sistematika Penyajian
7. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
 - 2.1 Dokumen perencanaan tahun 2024-2026
 - 2.2 Dokumen perencanaan tahun 2025-2029
8. Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Realisasi Anggaran
- 9. Bab IV Penutup
 - 4.1 Kesimpulan
 - 4.2 Saran

Lampiran :

1. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Pohon Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
3. Cascading Perangkat Daerah Tahun 2025.
4. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2025, terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah.
 - b. Kepala Bidang / Sekretaris atau setara Eselon III.
 - c. Kepala Sub Bidang atau setara Eselon IV.
 - d. Jabatan Fungsional Tertentu.
 - e. Pejabat Pelaksana.
5. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah Tahun 2025.
6. Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
7. Realisasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.
8. Penghargaan-penghargaan yang diperoleh baik lokal/nasional/internasional pada tahun 2025 (narasi dan penghargaan)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Untuk mengukur kinerja diperlukan perencanaan kinerja yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan yang terintegrasi dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025- 2029.

2.1 Dokumen Perencanaan Tahun 2024-2026

2.1.1 Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026

1. Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun kedepan. Tujuan Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 -2026 adalah :

- a. Mewujudkan Pengurangan Resiko Bencana.

Tujuan mewujudkan pengurangan resiko bencana dengan indikator Indeks Risiko bencana;

- b. Meningkatnya kinerja aparatur pelayanan publik BPBD.

Tujuan meningkatnya aparatur dan pelayanan publik BPBD dengan indikator Indeks kualitas pelayanan publik BPBD;

- c. Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran BPBD.

Tujuan Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran BPBD dengan indikator SAKIP BPBD. Untuk mencapai tujuan ditetapkan sasaran Rencana Strategis BPBD 2024-2026 yaitu:

- a. Berkurangnya kerentanan bencana.

Sasaran menurunnya kerentanan bencana dengan indicator Indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian.

- b. Meningkatnya profesionalitas ASN

Sasaran meningkatkan profesionalitas ASN dengan indikator indeks profesionalitas ASN.

- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik.

Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik dengan indikator Indeks sarana dan prasarana pelayanan pada BPBD.

- d. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja.

Sasaran meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan indikator nilai perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja SAKIP.

- e. Menurunnya temuan hasil BPK dan APIP.

Sasaran Menurunnya temuan dengan indicator jumlah temuan perangkat daerah atas temuan BPK/APIP.

2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan

dan sasaran Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis serta pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, kongkrit dan operasional. Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Renstra Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, maka dirumuskan strategi sebagai berikut :

- a. Menjalin Kerja sama Lintas Sektor atau pihak Lain untuk implementasi regulasi yang mendukung penanganan kebencanaan, penyusunan SOP
- b. pencegahan dan kesiapsiagaan, dan meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bencana
- c. Menjalin Kerja sama Lintas Sektor atau pihak Lain dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan serta kursus terkait kebencanaan untuk meningkatkan Kuantitas dan Kualitas tenaga teknis dan IT pada BPBD
- d. Menyusun Dokumen kajian resiko bencana untuk mengetahui sumber dan jenis bencana dalam mengantisipasi Perubahan Iklim Global dan meningkatnya intensitas skala bencana
- e. Memperbanyak jumlah desa tangguh bencana berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dokumen Renkon (Rencana Kontigensi)
- f. Memaksimalkan Dukungan instansi / dinas terkait baik pusat maupun daerah untuk pemenuhan kebutuhan Sarana dan prasarana kerja
- g. Menyusun Peta dan Data daerah rawan bencana untuk memaksimalkan cakupan wilayah Penanganan Penanggulangan

Kebencanaan dengan kondisi geografis dan jenis potensi bencana yang beragam

- h. Memanfaatkan Dokumen Renkon (Rencana Kontigensi) untuk Meningkatkan kegiatan mitigasi struktural dan non struktural dalam menghadapi meningkatnya intensitas skala bencana

Arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yaitu :

- a. Menyiapkan regulasi, meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat, meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, degradasi lingkungan dan anomali iklim serta meningkatkan manajemen resiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan bencana. Penyediaan lahan tinggal dan perubahan pola hidup masyarakat;

Untuk menerangkan kualitas antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

MISI :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan Pengurangan Resiko Bencana	1. Berkurangnya kerentanan bencana	1. Menjalin Kerja sama Lintas Sektor atau pihak Lain untuk implementasi regulasi yang mendukung penanganan kebencanaan ,penyusunan SOP pencegahan dan kesiapsiagaan , dan meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bencana	1. Menyiapkan regulasi, meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat, meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, degradasi lingkungan dan anomali iklim serta meningkatkan manajemen resiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan bencana. Penyediaan lahan tinggal dan perubahan pola hidup masyarakat
		2. Menjalin Kerja sama Lintas Sektor atau pihak Lain dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan serta kursus terkait kebencanaan untuk meningkatkan Kuantitas dan Kualitas tenaga teknis dan IT pada BPBD	2. Menyiapkan regulasi, meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, degradasi lingkungan dan anomali iklim serta meningkatkan manajemen resiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan bencana.
		1. Peningkatan pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana	Adanya sistim edukasi kebencanaan secara menyeluruh untuk seluruh lapisan masyarakat.
		2. Pembentukan desa tangguh bencana	Pembentukan legislasi dan kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas dan penyelenggaraan penanggulangan bencana
		3. Pengintegrasian system peringatan dini	Penyediaan mekanisme system informasi peringatan dini kebencanaan
		4. Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan secara structural dan Non struktural	Perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan resiko bencana

2.1.2 Indikator Kinerja Utama 2024-2026

Mengacu pada Keputusan Bupati Sikka Nomor 682 /HK/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 dan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Nomor : BPBD.360/sekret 7/ HK/ 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daaerah Kabupaten Sikka tahun 2024 maka Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



1. Indikator Kinerja Utama :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2024-2026

NO	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
	Tujuan ; Mewujudkan Pengurangan Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indek Risiko Bencana merupakan perangkat analisis berbasis data yang mengukur tingkat risiko bencana (rendah, sedang, tinggi) di suatu wilayah, biasanya per kabupaten/kota atau provinsi. Cara perhitungan indeks rsiko bencana dapat dilakukan dengan formulasi rumus sebagai berikut: $R = H \times \frac{V}{C}$ dimana : H dan V diasumsikan Konstan; H : Kemungkinan Kejadian dan Besaran Dampak yang Timbul; V : Tingkat Kerentanan pada suatu wilayah tertentu; C : Tingkat Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.	Indeks				
	Sasaran :							
1.	Berkurangnya Kerentanan Bencana	1. Potensi Penduduk Terpapar	Jumlah penduduk terpapar bencana dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang berada di wilayah rawan bencana sesuai tingkat kerawanannya. Perhitungan dilakukan dengan mengintegrasikan data kependudukan dan peta kawasan rawan bencana, sehingga diperoleh total penduduk yang berpotensi terdampak sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana.	Jiwa				
		2. Potensi Kerugian						
		a. Fisik	Potensi kerugian fisik merupakan kondisi kerusakan pada bangunan, infrastruktur, dan fasilitas umum yang terdampak bencana, sedangkan jumlah riil kerusakan dan kerugian	Rupiah				

NO	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
			adalah kerusakan dan kerugian fisik yang terjadi berdasarkan hasil pendataan lapangan.					
		b. Ekonomi	Potensi kerugian ekonomi merupakan nilai kerugian ekonomi yang akan timbul akibat terjadinya bencana, sedangkan jumlah riil kerusakan dan kerugian merupakan nilai kerusakan dan kerugian yang terjadi berdasarkan hasil pendataan pascabencana. Data ini digunakan sebagai dasar evaluasi dampak bencana serta perencanaan penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara tepat sasaran.	Rupiah				
		c. Lingkungan	Potensi kerugian lingkungan menggambarkan dampak bencana terhadap kondisi lingkungan hidup, termasuk kerusakan ekosistem, sumber daya alam, dan penurunan kualitas lingkungan. Sementara itu, jumlah riil kerusakan dan kerugian menunjukkan kerusakan dan kerugian lingkungan yang terjadi berdasarkan hasil inventarisasi dan pendataan di lapangan,	Hektar				
		Kapasitas :			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Penanggulangan Bencana		DAU
		Jumlah Dokumen		Dokumen	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana kabupaten / kota	Prosentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
		Jumlah Regulasi		Regulasi	Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana kabupaten / kota per	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi tentang Rawan Bencana	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	

NO	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
					jenis bencana			
		Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan		Persentase				
		Jumlah Desa tangguh bencana		Desa				
		Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan			Kegiatan : Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	DAU
					Sub Kegiatan Penyusunan rencana Kotijensi	Jumlah Dokumen rencana Kontijensi		
					Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah pencegahan dan Mitigasi bencana		DAU SG
					Sub Kegiatan Penanganan Pasca bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Penanganan Pasca Bencana kabupaten / Kota	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	DAU
					Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	Prosentase penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
					Sub Kegiatan Respon Cepat darurat bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Darurat Bencana		
					Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik	Kepala Bidang Rehabilitasi dan	DAU

NO	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Penanggungjawab	Sumber Dana
					Evakuasi Korban Bencana kabupaten / Kota penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Terlaksananya Sistim dasar penaggulangan Bencana	Rekonstruksi	
					Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		



2. Target Tahunan Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.3
Target Tahunan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2024

NO	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Tahun			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
	Tujuan Mewujudkan Pengurangan Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	12,610	129,08	123,38	117,68	370,14
	Sasaran : Berkurangnya Kerentanan Bencana	Potensi Penduduk Terpapar	Jiwa	313,321	13.548	12.548	12.548	255,202
		Potensi Kerugian :						
		a. Fisik	Rupiah	2.208.480.000	2.893.495.540	2.500.000.000	2,000,000,000	7,393,495,540
		b. Ekonomi	Rupiah	1.27.200.000.000	1.27.200.000.000	120.840.000.000	109,058,100,000	357,098,100,000
		c. Lingkungan	Hektar	75.937	65.157	60.157	55.157	180,471
		Kapasitas :						
		Jumlah Dokumen	Dokumen		5	5	5	15
		Jumlah Regulasi	Regulasi		2	1	2	5
		Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	Persen		100	100	100	100
		Jumlah Desa tangguh bencana	Desa		8	12	16	36

2.1.3 Rencana Kinerja Tahunan Perubahan BPBD Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan BPBD Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan penanggulangan bencana serta perkembangan kondisi aktual di daerah. Perubahan rencana kinerja ini bertujuan untuk memastikan ketercapaian sasaran strategis secara lebih efektif dan efisien, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang berlaku. Adapun rincian Rencana Kinerja Tahunan Perubahan BPBD Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahunan 2025 Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Sikka

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana	Indeks	140,81
		Potensi Penduduk Terpapar	Jiwa	34,092
		Potensi Kerugian Ekonomi	Rupiah	1.000.000.000
		Potensi Kerugian Fisik	Rupiah	1.000.000.000
		Potensi Kerugian Lingkungan	Hektar	100
		Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,44
2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	72,5

Rencana Kerja Tahunan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Sasaran strategis pertama adalah berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sasaran ini diukur melalui Indeks Risiko Bencana dengan target sebesar 140,81, yang mencerminkan tingkat risiko bencana di wilayah Kabupaten Sikka. Selain itu, ditetapkan indikator pendukung berupa potensi penduduk terpapar sebesar 34.092 jiwa, potensi kerugian ekonomi sebesar Rp1.000.000.000, potensi kerugian fisik sebesar Rp1.000.000.000, serta potensi kerugian lingkungan seluas 100 hektar. Untuk memperkuat

ketangguhan wilayah, ditetapkan pula Indeks Ketahanan Daerah dengan target 0,44, sebagai upaya meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana.

Sasaran strategis kedua adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 72,5, yang menunjukkan komitmen BPBD Kabupaten Sikka dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang akuntabel dan transparan. Penetapan sasaran dan indikator kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Sikka.

2.1.4 Perjanjian Kinerja Perubahan BPBD Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 BPBD Kabupaten Sikka merupakan dokumen komitmen kinerja antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka dengan Bupati Sikka dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. Perjanjian kinerja ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan kebijakan, program, dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja BPBD secara terukur dan akuntabel.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 BPBD Kabupaten Sikka disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Indeks Risiko Bencana	Indeks	140,81
		2. Potensi Penduduk Terpapar	Jiwa	34,092
		3. Potensi Kerugian Ekonomi	Rupiah	1.000.000.000
		4. Potensi Kerugian Fisik	Rupiah	1.000.000.000
		5. Potensi Kerugian Lingkungan	Hektar	100
		6. Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,44
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	72,5

	kinerja Perangkat Daerah			
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.599.047.019,-	APBD	
2	Penanggulangan Bencana	516.329.400.-	APBD	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JOHANES BERKHMANS CHRISTOFORUS PUTU BOTHA, S.T.**

Jabatan : Plt.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : **JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO**

Jabatan : Bupati Sikka

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

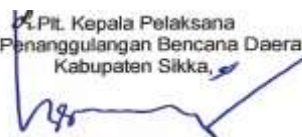
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 3 November 2025

PIHAK KEDUA


BUPATI SIKKA,
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

PIHAK KESATU


Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka,
Johanes B.C. Putu Botha, ST
Pembina Tingkat I
NIP 19741115 200012 1 005

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 menggambarkan komitmen kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025, yang didukung oleh indikator kinerja utama serta alokasi anggaran program. Sasaran strategis pertama adalah berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban

masyarakat. Pencapaian sasaran ini diukur melalui enam indikator kinerja utama, yaitu Indeks Risiko Bencana dengan target 140,81, potensi penduduk terpapar sebesar 34.092 jiwa, potensi kerugian ekonomi sebesar Rp1.000.000.000, potensi kerugian fisik sebesar Rp1.000.000.000, potensi kerugian lingkungan seluas 100 hektar, serta Indeks Ketahanan Daerah dengan target 0,44. Indikator-indikator tersebut mencerminkan upaya pengurangan risiko bencana secara komprehensif melalui pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peningkatan ketangguhan daerah.

Sasaran strategis kedua adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah. Sasaran ini diukur melalui Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 72,5, sebagai wujud peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan BPBD Kabupaten Sikka. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, dialokasikan anggaran melalui dua program utama. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung anggaran sebesar Rp2.599.047.019,- yang bersumber dari APBD, yang diarahkan untuk mendukung kelancaran operasional, administrasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Selanjutnya, Program Penanggulangan Bencana dialokasikan anggaran sebesar Rp516.329.400,- yang bersumber dari APBD, yang difokuskan pada pelaksanaan kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Dengan adanya perjanjian kinerja perubahan ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Sikka pada Tahun 2025 dapat berjalan secara terarah, terukur, dan akuntabel dalam rangka mendukung pengurangan risiko bencana dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.1.5 Keselarasan Indikator Utama BPBD Tahun 2025 pada Renstra Tahun 2024-2026

Keselarasasan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Renstra BPBD menunjukkan bahwa IKU BPBD Tahun 2025 telah disusun dan ditetapkan secara konsisten dengan Keputusan Kepala BPBD tentang IKU BPBD Tahun 2024–2026, serta selaras dengan Rencana Kinerja Perubahan BPBD Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan BPBD Tahun 2025. Keselarasan ini memastikan bahwa indikator, target,

dan sasaran kinerja yang ditetapkan mendukung pencapaian tujuan strategis BPBD sebagaimana tertuang dalam Renstra, serta menjadi dasar pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja secara terukur dan akuntabel dilihat pada tabel dibawa ini;

Tabel 2.6
Keselarasan Indikator Utama Tahun 2025 Pada Renstra BPBD

No	IKU Perangkat Daerah		Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2025	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	LKJLP Perangkat Daerah Tahun 2025
	Dasar Renstra Tahun 2024-2026	Keputusan Kepala PD tentang IKU di BPBD	Dasar Keputusan Kepala PD Tentang IKU Di BPBD dan DPA/DPPA	Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2025 dan DPA/DPPA	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
1	Indeks Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana
2	Potensi Penduduk Terpapar	Potensi Penduduk Terpapar	Potensi Penduduk Terpapar	Potensi Penduduk Terpapar	Potensi Penduduk Terpapar
3	Potensi Kerugian Ekonomi	Potensi Kerugian Ekonomi	Potensi Kerugian Ekonomi	Potensi Kerugian Ekonomi	Potensi Kerugian Ekonomi
4	Potensi Kerugian Fisik	Potensi Kerugian Fisik	Potensi Kerugian Fisik	Potensi Kerugian Fisik	Potensi Kerugian Fisik
5	Potensi Kerugian Lingkungan	Potensi Kerugian Lingkungan	Potensi Kerugian Lingkungan	Potensi Kerugian Lingkungan	Potensi Kerugian Lingkungan
6	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

2.2 Dokumen Perencanaan Tahunan 2025-2029

2.2.1 Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1. Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka

A. Tujuan

Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam penyusunan renstra menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan penyusunan Renstra

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 adalah: **Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat dengan indikator indeks resiko bencana.**

Pencapaian tujuan ini didukung dengan indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan indikator Indeks Risiko Bencana. Untuk memastikan tujuan tersebut dapat dicapai secara terukur, maka ditetapkan sasaran yang lebih spesifik. Sasaran ini merupakan penjabaran operasional dari tujuan, sekaligus jawaban langsung terhadap isu strategis.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan perlu ditetapkan sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

- 1) Berkurangnya Resiko Bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan indikator Indeks Resiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah, jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian yang terdiri dari Fisik, Ekonomi dan Lingkungan. Sasaran ini menekankan akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Upaya pengurangan risiko bencana akan meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi kepanikan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pengurangan risiko bencana akan sangat berdampak pada peningkatan Indeks Resiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah serta disisi lain akan mengurangi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian yang terdiri dari Fisik, Ekonomi dan Lingkungan.
- 2) Sasaran Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja pelayanan badan penanggulangan bencana dengan indikator Sakip BPBD.
- 3) Sasaran ini dimaksudkan untuk memperkuat BPBD dalam upaya Penanggulangan Bencana. Semua dukungan berupa anggaran, peningkatan kapasitas, sarana prasarana serta

dokumen kebencanaan akan sangat menentukan peningkatan kinerja BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

Tujuan dan sasaran di atas kemudian ditetapkan target atau proyeksi untuk menjadi panduan dalam menyusun perencanaan tahunan serta untuk menjadi instrumen evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Penetapan target atau proyeksi pada setiap indikator tujuan dan sasaran daerah dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.7
Tujuan dan Sasaran BPBD Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.05.0.00.0.00.06.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH											
Meningkatnya keamanan dan kerukunan masyarakat	Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat		Indeks Risiko Bencana (Indeks)	141,81	140,81	140,31	139,81	139,31	138,81	138,31	
		Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)	34,092	34,092	30,685	27,276	23,863	20,458	19,049	
			Potensi Kerugian Ekonomi (Rp)	1.000.000.000	1.000.000.000	900.000.000	800.000.000	700.000.000	600.000.000	500.000.000	
			Potensi Kerugian Fisik (Rp)	1.000.000.000	1.000.000.000	900.000.000	800.000.000	700.000.000	600.000.000	500.000.000	
			Potensi Kerugian	100	100	90	80	70	60	50	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETER ANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Lingkungan (Ha)								
			Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	69,60	72,5	75	77	79	80	82	



2. Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi disusun untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi, sedangkan arah kebijakan menjadi acuan dalam menentukan prioritas pembangunan perangkat daerah. Pelaksanaannya diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya, serta optimalisasi koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat agar penyelenggaraan tugas dan fungsi dapat berjalan efektif dan efisien.

A. Rencana Strategis

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Sikka. Analisis tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi faktor keberhasilan dan kendala, sehingga dapat disusun strategi yang realistis dan terarah. Selanjutnya, strategi tersebut dijabarkan ke dalam arah kebijakan yang lebih spesifik dan operasional guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dalam upaya mencapai sasaran-sasaran Renstra Badan Penggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan sumber daya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana cuaca ekstrim dan hidrometeorologi (iklim global)
- 2) Peningkatan kesiapsiagaan, pencegahan dan mitigasi melalui pendidikan, pelatihan dan sosialisasi dengan dukungan anggaran, sarana prasarana dan SDM dari Pemerintah Pusat dalam menghadapi ancaman peningkatan intensitas skala bencana bagi warga masyarakat di kawasan rawan bencana
- 3) Peningkatan kerjasama dengan multi helix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berupa pengurangan resiko bencana pada kawasan rawan bencana, penyusunan dokumen kebencanaan, penanganan darurat

bencana, peningkatan sarana prasarana dan SDM, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

- 4) Peningkatan fungsi, peran, dan kapasitas TRC dan Relawan, serta penyusunan dan penerapan SOP dalam pelaksanaan penanggulangan bencana
- 5) Pembentukan Peraturan Daerah tentang pengurangan resiko bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrim dan hidrometrologi (Iklim Global)

Strategi Renstra BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan secara spesifik pada masing-masing sasaran, secara terstruktur strategi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Strategi BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Berkurangnya Resiko Bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	1. Peningkatan sumber daya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana cuaca ekstrim dan hidrometrologi (iklim global);
		2. Peningkatan kesiapsiagaan, pencegahan dan mitigasi melalui pendidikan, pelatihan dan sosialisasi dengan dukungan anggaran, sarana prasarana dan SDM dari Pemerintah Pusat dalam menghadapi ancaman peningkatan intensitas skala bencana bagi warga masyarakat di kawasan rawan bencana;
		3. Peningkatan kerjasama dengan multi helix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berupa pengurangan resiko bencana pada kawasan rawan bencana, penyusunan dokumen kebencanaan, penanganan darurat bencana, peningkatan sarana prasarana dan SDM, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
	2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja pelayanan badan penanggulangan bencana	1. Peningkatan fungsi, peran, dan kapasitas TRC dan penyusunan serta penerapan SOP dalam pelaksanaan penanggulangan bencana
		2. Pembentukan Peraturan Daerah tentang pengurangan resiko bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrim dan hidrometrologi (Iklim Global).

B. Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, partisipatif, dan berbasis data, BPBD Kabupaten Sikka menetapkan arah kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan. Arah kebijakan ini menjadi penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sekaligus sebagai acuan dalam merancang program dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Fokus utama arah kebijakan BPBD adalah Peningkatan sumber daya (SDM, anggaran, dan sarana prasarana) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pengoptimalan peran dan fungsi TRC dan pembentukan regulasi, serta Penguatan kapasitas dan kerjasama multi helix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Peningkatan sumber daya (SDM, anggaran, dan sarana prasarana) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- 2) Pengoptimalan peran dan fungsi TRC dan pembentukan regulasi
- 3) Penguatan kapasitas dan kerjasama multi helix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Secara rinci tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan penanggulangan Bencana tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.9
Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan				
Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
Peningkatan sumber daya (SDM, anggaran, dan sarana prasarana) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,	Pengoptimalan peran dan fungsi TRC dan pembentukan regulasi	Penguatan kapasitas dan kerjasama multi helix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Penguatan kapasitas dan kerjasama multi helix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Penguatan kapasitas dan kerjasama multi helix dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

2.2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan kebencanaan. IKU berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menilai kontribusi program dan kegiatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:



1. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.10
Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2025

NO	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Penanggung jawab	Sumber Dana
	Tujuan ; Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana merupakan perangkat analisis berbasis data yang mengukur tingkat risiko bencana (rendah, sedang, tinggi) di suatu wilayah, biasanya per kabupaten/kota atau provinsi. Cara perhitungan indeks risiko bencana dapat dilakukan dengan formulasi rumus sebagai berikut: $R = \frac{H \times V}{C}$ dimana : H dan V diasumsikan Konstan; H : Kemungkinan Kejadian dan Besaran Dampak yang Timbul; V : Tingkat Kerentanan pada suatu wilayah tertentu; C : Tingkat Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana.	Indeks				
	Sasaran :							
2.	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Potensi Penduduk Terpapar	Jumlah penduduk terpapar bencana dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang berada di wilayah rawan bencana sesuai tingkat kerawannya. Perhitungan dilakukan dengan mengintegrasikan data kependudukan dan peta kawasan rawan bencana, sehingga diperoleh total penduduk yang	Jiwa				

NO	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Penanggung jawab	Sumber Dana
			berpotensi terdampak sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana.					
		Potensi Kerugian Ekonomi	Potensi kerugian ekonomi merupakan nilai kerugian ekonomi yang akan timbul akibat terjadinya bencana, sedangkan jumlah riil kerusakan dan kerugian merupakan nilai kerusakan dan kerugian yang terjadi berdasarkan hasil pendataan pascabencana. Data ini digunakan sebagai dasar evaluasi dampak bencana serta perencanaan penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara tepat sasaran.	Rupiah				
		Potensi Kerugian Fisik	Potensi kerugian fisik merupakan kondisi kerusakan pada bangunan, infrastruktur, dan fasilitas umum yang terdampak bencana, sedangkan jumlah riil kerusakan dan kerugian adalah kerusakan dan kerugian fisik yang terjadi berdasarkan hasil pendataan lapangan.	Rupiah				
		Potensi Kerugian Lingkungan	Potensi kerugian lingkungan menggambarkan dampak bencana terhadap kondisi lingkungan hidup, termasuk kerusakan ekosistem, sumber daya alam, dan penurunan kualitas lingkungan. Sementara itu, jumlah riil kerusakan dan kerugian menunjukkan kerusakan dan kerugian lingkungan yang terjadi berdasarkan hasil inventarisasi dan pendataan di lapangan,	Hektar				
		Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah merupakan ukuran tingkat kemampuan daerah dalam mengantisipasi, menghadapi, dan memulihkan dampak bencana, yang tercermin dari kondisi	Angka				

NO	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formula Perhitungan	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Penanggung jawab	Sumber Dana
			kerusakan dan kerugian yang terjadi. Jumlah riil kerusakan dan kerugian digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat ketahanan daerah serta menjadi dasar dalam perencanaan peningkatan kapasitas dan pengurangan risiko bencana.					
2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat pada setiap perangkat daerah	Angka				
					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Penanganan Bencana		DAU
					Kegiatan : Pelayanan Informasih Rawan Bencana kabupaten / kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	DAU
					Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasih dan Edukasi (KIE) rawan Bencana kabupaten / kota per jenis bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)		
					Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan		

NO	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formula Perhitungan	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Penanggung jawab	Sumber Dana
						dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)		
					Kegiatan : Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase dokumen respon cepat dan logistik	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	DAU
					Sub Kegiatan : Respon Cepat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)		
					Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten / Kota	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase dokumen pascabencana, regulasi, pemanfaatan sistem dan peningkatan kapasitas aparatur	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	DAU
					Sub Kegiatan : Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)		

NO	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formula Perhitungan	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Penanggung jawab	Sumber Dana
						Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Sekretariat	DAU
					Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		DAU
					Sub Kegiatan : Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		
					Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		
					Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		
					Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		

NO	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formula Perhitungan	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Penanggung jawab	Sumber Dana
					Keuangan SKPD	(Dokumen)		
					Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase dokumen admistrasi, komponen listrik dan peralatan kantor serta paket cetakan dan penggandaan		DAU
					Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		
					Sub Kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		
					Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		
					Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		
					Sub kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
					Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase unit pengadaan barang dan jasa		DAU
					Sub kegiatan: Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		

NO	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formula Perhitungan	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Penanggung jawab	Sumber Dana
						(Unit)		
					Sub Kegiatan; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		
					Kegiatan; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase dokumen laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air, listrik dan pelayanan umum kantor		DAU
					Sub kegiatan ; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		
					Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		
					Kegiatan; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase unit peralatan dan mesin, kendaraan dan gedung kantor		DAU
					Sub kegiatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		

NO	Tujuan Dan Sasaran	Indikator Tujuan/Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formula Perhitungan	Satuan	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Penanggung jawab	Sumber Dana
					Sub Kegiatan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		
					Sub Kegiatan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		

2. Target Tahunan Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.11
Target Tahunan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.05.0.00.0.00.06.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH									
2.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	141,81	140,81	140,31	139,81	139,31	138,81	138,31	
3.	Potensi Penduduk Terpapar	Jiwa	34,092	34,092	30,685	27,276	23,863	20,458	19,049	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	69,6	72,5	75	77	79	80	82	
5.	Potensi Kerugian Ekonomi	Rp	1.000.000.000	1.000.000.000	900.000.000	800.000.000	700.000.000	600.000.000	500.000.000	
6.	Potensi Kerugian Fisik	Rp	1.000.000.000	1.000.000.000	900.000.000	800.000.000	700.000.000	600.000.000	500.000.000	
7.	Potensi Kerugian Lingkungan	Ha	100	100	90	80	70	60	50	
8.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	

2.2.3 Rencana Kinerja Tahunan Perubahan BPBD Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan Perubahan BPBD Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan penanggulangan bencana serta perkembangan kondisi aktual di daerah. Perubahan rencana kinerja ini bertujuan untuk memastikan ketercapaian sasaran strategis secara lebih efektif dan efisien, dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang berlaku. Adapun rincian Rencana Kinerja Tahunan Perubahan BPBD Tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12
Rencana Kerja Tahunan 2025
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana	Indeks	140,81
		Potensi Penduduk Terpapar	Jiwa	34,092
		Potensi Kerugian Ekonomi	Rupiah	1.000.000.000
		Potensi Kerugian Fisik	Rupiah	1.000.000.000
		Potensi Kerugian Lingkungan	Hektar	100
		Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,44
2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	72,5

Rencana Kerja Tahunan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Sasaran strategis pertama adalah berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sasaran ini diukur melalui Indeks Risiko Bencana dengan target sebesar 140,81, yang mencerminkan tingkat risiko bencana di wilayah Kabupaten Sikka. Selain itu, ditetapkan indikator pendukung berupa potensi penduduk terpapar sebesar 34.092 jiwa, potensi kerugian ekonomi sebesar Rp1.000.000.000, potensi kerugian fisik sebesar Rp1.000.000.000, serta potensi kerugian lingkungan seluas 100

hektar. Untuk memperkuat ketangguhan wilayah, ditetapkan pula Indeks Ketahanan Daerah dengan target 0,44, sebagai upaya meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana.

Sasaran strategis kedua adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 72,5, yang menunjukkan komitmen BPBD Kabupaten Sikka dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi kinerja yang akuntabel dan transparan. Penetapan sasaran dan indikator kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Sikka.

2.2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan BPBD Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 BPBD Kabupaten Sikka merupakan dokumen komitmen kinerja antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka dengan Bupati Sikka dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. Perjanjian kinerja ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan kebijakan, program, dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja BPBD secara terukur dan akuntabel.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 BPBD Kabupaten Sikka disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.13
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	a. Indeks Risiko Bencana	Indeks	140,81
		b. Potensi Penduduk Terpapar	Jiwa	34,092
		c. Potensi Kerugian Ekonomi	Rupiah	1.000.000.000
		d. Potensi Kerugian Fisik	Rupiah	1.000.000.000
		e. Potensi Kerugian Lingkungan	Hektar	100

		f. Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,44
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	72,5
NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.599.047.019,-	APBD	
2	Penanggulangan Bencana	516.329.400,-	APBD	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JOHANES BERKHMANS CHRISTOFORUS PUTU BOTHA, S.T.**

Jabatan : Plt.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

Nama : **JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO**

Jabatan : Bupati Sikka

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 3 November 2025

PIHAK KEDUA

BUPATI SIKKA,
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

PIHAK KESATU,

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka,
Johanes B.C. Putu Botha, ST
Pembina Tingkat I
NIP 19741115 200012 1 005

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 menggambarkan komitmen kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025, yang didukung oleh indikator kinerja utama serta alokasi anggaran program. Sasaran strategis pertama adalah berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pencapaian sasaran ini diukur melalui enam indikator kinerja utama, yaitu Indeks Risiko Bencana dengan target 140,81, potensi penduduk terpapar sebesar 34.092 jiwa, potensi kerugian ekonomi sebesar Rp1.000.000.000, potensi kerugian

fisik sebesar Rp1.000.000.000, potensi kerugian lingkungan seluas 100 hektar, serta Indeks Ketahanan Daerah dengan target 0,44. Indikator-indikator tersebut mencerminkan upaya pengurangan risiko bencana secara komprehensif melalui pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peningkatan ketangguhan daerah.

Sasaran strategis kedua adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah. Sasaran ini diukur melalui Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target 72,5, sebagai wujud peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan BPBD Kabupaten Sikka. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, dialokasikan anggaran melalui dua program utama. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung anggaran sebesar Rp2.599.047.019,- yang bersumber dari APBD, yang diarahkan untuk mendukung kelancaran operasional, administrasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Selanjutnya, Program Penanggulangan Bencana dialokasikan anggaran sebesar Rp516.329.400,- yang bersumber dari APBD, yang difokuskan pada pelaksanaan kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dengan adanya perjanjian kinerja perubahan ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Sikka pada Tahun 2025 dapat berjalan secara terarah, terukur, dan akuntabel dalam rangka mendukung pengurangan risiko bencana dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.2.5 Keselarasan Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2025 Pada Renstra BPBD Tahun 2025-2029.

Keselaran Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Tahun 2025 disusun untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah. IKU BPBD Tahun 2025 mengacu pada Renstra BPBD serta selaras dengan Keputusan Kepala BPBD tentang IKU BPBD Tahun 2025–2029, Rencana Kinerja Tahunan

Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Perubahan BPBD Tahun 2025, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.14
Keselarasan IKU BPBD Tahun 2025 Pada Renstra BPBD
Tahun 2025-2029

No	IKU Perangkat Daerah		Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2025	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	LKJLP Perangkat Daerah Tahun 2025
	Dasar Renstra Tahun 2024-2026	Keputusan Kepala PD tentang IKU di BPBD	Dasar Keputusan Kepala PD Tentang IKU Di BPBD dan DPA/DPPA	Rencana Kinerja Tahunan Perubahan Tahun 2025 dan DPA/DPPA	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
1	Indeks Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana
2	Potensi Penduduk Terpapar	Potensi Penduduk Terpapar	Potensi Penduduk Terpapar	Potensi Penduduk Terpapar	Potensi Penduduk Terpapar
3	Potensi Kerugian Ekonomi	Potensi Kerugian Ekonomi	Potensi Kerugian Ekonomi	Potensi Kerugian Ekonomi	Potensi Kerugian Ekonomi
4	Potensi Kerugian Fisik	Potensi Kerugian Fisik	Potensi Kerugian Fisik	Potensi Kerugian Fisik	Potensi Kerugian Fisik
5	Potensi Kerugian Lingkungan	Potensi Kerugian Lingkungan	Potensi Kerugian Lingkungan	Potensi Kerugian Lingkungan	Potensi Kerugian Lingkungan
6	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2025 yang memuat realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2025. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka.

3.1.1 Analisis Sesuai Indikator Kinerja Utama 2025 Berpedoman Pada Dokumen Renstra BPBD Tahun 2024-2026

1. Analisis Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana daerah berdasarkan target capaian pada Renstra BPBD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 terdapat empat indikator kinerja yang harus dicapai oleh BPBD Kabupaten Sikka pada tahun 2025. Dari target capaian tersebut jika dibandingkan dengan realisasi kinerja BPBD Kabupaten Sikka tahun 2025 maka setiap indikator memperoleh capaian kinerja yang cukup baik. Target indikator kinerja Indeks Risiko Bencana (IRB) ditetapkan sebesar 123,38 realisasi IRB mencapai 180,09 atau 145,96 persen, yang menunjukkan tingkat risiko bencana masih berada di atas target yang direncanakan. Target indikator kinerja kedua yaitu potensi penduduk terpapar dengan nilai target 12.548 jiwa dengan realisasi sampai dengan tahun 2025 untuk penduduk terpapar mendapat nilai 6.892 atau 54,93 persen. Target indikator kinerja ketiga potensi kerugian yang terdiri dari kerugian fisik dengan target 2.500.000.000 dan realisasi 90.018.170.000 atau 3,60 persen, Ekonomi dengan target 120.840.000.000 dan realisasi sebesar 32.882.745.000 atau 27,21 persen, Lingkungan dengan target 60.157 dan realisasi sebesar 30 atau 0,05 persen. Indikator keempat kapasitas terdiri dari: Jumlah dokumen dengan target 5 dokumen dan realisasi 5 dokumen atau 100 persen, Jumlah regulasi dengan target 1 regulasi dan realisasi 0 atau 0 persen,

Prosentase kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan dengan target 100 dan realisasi 100 atau 100 persen, dan jumlah desa tangguh bencana dengan target 12 desa dan realisasi 5 desa atau 41,46 persen.

Tabel 3.1
Analisis Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja
Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2024-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Presentasi %
Berkurangnya Kerentanan Bencana	Indeks Risiko Bencana	123,38	180,09	145,96
	Potensi Penduduk Terpapar	12.548	6.892	54,93
	Potensi Kerugian			
	Fisik	2.500.000.000	90.018.170.000	3,60
	Ekonomi	120.840.000.000	32.882.745.000	27,21
	Lingkungan	60.157	30	0,05
	Kapasitas :			
	Jumlah Dokumen	5	5	100
	Jumlah Regulasi	1	0	0
	Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	100	100	100
	Jumlah Desa tangguh bencana	12	5	41,67

2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi tahun 2024 dan 2023

Analisis perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan realisasi kinerja Tahun 2024 dan 2023 disusun untuk memperoleh gambaran perkembangan dan konsistensi capaian kinerja dari tahun ke tahun. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai peningkatan atau penurunan kinerja, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.2
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 Berdasarkan
Renstra Tahun 2024-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Berkurangnya Kerentanan Bencana	Indeks Risiko Bencana	123,38	180,09	141,81	135,14%
	Potensi Penduduk Terpapar	12.548	6.892	10.000	15.452
	Potensi Kerugian :				
	Fisik	2.500.000.000	90.018.170.000	1.500.000.000	1.000.000.000
	Ekonomi	120.840.000.000	32.882.745.000	120.000.000.000	1.000.000.000
	Lingkungan	60.157	30	50.000	0
	Kapasitas :				
	Jumlah Dokumen	5	5	0	0
	Jumlah Regulasi	1	0	0	0
	Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	100	100	100	0
	Jumlah Desa tangguh bencana	12	5	5	0

Pada tahun 2025, target Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 123,38, dengan realisasi mencapai 180,09 atau 145,96 persen. Sebagai perbandingan, pada tahun 2024 realisasi IRB tercatat sebesar 141,81 atau 114,93 persen, sedangkan pada tahun 2023 realisasi IRB sebesar 135,14 atau 109,53 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa capaian IRB dari tahun ke tahun masih berada di atas target yang ditetapkan, sehingga diperlukan penguatan upaya pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan. Dari sisi potensi penduduk terpapar, target tahun 2025 sebesar 12.548 jiwa, dengan realisasi tahun 2025 tercatat 6.892 jiwa. Angka ini lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 10.000 jiwa dan tahun 2023 sebesar 15.452 jiwa. Penurunan jumlah penduduk terpapar tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan risiko bencana, baik melalui upaya mitigasi struktural dan nonstruktural maupun peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.

Pada indikator potensi kerugian bencana, capaian menunjukkan variasi antar jenis kerugian. Potensi kerugian fisik pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp2.500.000.000, namun realisasi mencapai Rp90.018.170.000, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.500.000.000 dan tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000. Kondisi ini mencerminkan masih tingginya dampak kerusakan fisik akibat kejadian

bencana. Sementara itu, potensi kerugian ekonomi pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp120.840.000.000 dengan realisasi Rp32.882.745.000, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp120.000.000.000, namun lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000. Adapun potensi kerugian lingkungan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 60.157 dengan realisasi sebesar 30, jauh menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 50.000 dan nihil pada tahun 2023, yang menunjukkan dampak lingkungan akibat bencana relatif kecil pada tahun berjalan.

Dari aspek kapasitas penanggulangan bencana, jumlah dokumen kebencanaan pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 5 dokumen dan seluruhnya telah terealisasi, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 dan 2023 yang belum memiliki dokumen. Namun demikian, indikator jumlah regulasi belum menunjukkan capaian karena dari target 1 regulasi pada tahun 2025 belum terealisasi, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan pada tahun 2025 telah mencapai 100 persen, konsisten dengan capaian tahun 2024 dan meningkat dibandingkan tahun 2023 yang belum melaksanakan kegiatan. Selanjutnya, jumlah Desa Tangguh Bencana pada tahun 2025 tercapai sebanyak 5 desa dari target 12 desa, sama dengan capaian tahun 2024 dan meningkat dibandingkan tahun 2023 yang belum memiliki desa tangguh bencana.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan adanya kemajuan pada pengurangan jumlah penduduk terpapar serta peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, khususnya pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Namun demikian, masih diperlukan upaya yang lebih kuat dalam menekan kerugian fisik dan ekonomi akibat bencana serta mempercepat pemenuhan regulasi dan pengembangan Desa Tangguh

Bencana agar sasaran pengurangan kerentanan bencana dapat tercapai secara optimal.

3. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir yang terdapat dalam Dokumen Renstra BPBD Tahun 2024-2026

Analisis perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2024-2026 dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah direncanakan. Perbandingan ini memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara realisasi kinerja dengan target akhir Renstra, sekaligus menjadi dasar dalam mengidentifikasi capaian, kekurangan, dan langkah perbaikan yang diperlukan. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2025 Dengan Target Akhir Terdapat Pada Renstra BPBD
Tahun 2024-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2024-2026	Persentase %
Berkurangnya Kerentanan Bencana	Indeks Risiko Bencana	180,09	117,68	153,03
	Potensi Penduduk Terpapar	6.892	12.548	54,93
	Potensi Kerugian :			
	Fisik	90.018.170.000	2.000.000.000	4,5
	Ekonomi	32.882.745.000	109.058.100.000	4,54
	Lingkungan	30	55.157	0,05
	Kapasitas :			
	Jumlah Dokumen	5	5	100
	Jumlah Regulasi	0	2	0
	Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	100	100	100
	Jumlah Desa tangguh bencana	5	16	31,25

Berdasarkan perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir yang ditetapkan dalam Renstra BPBD Tahun 2024-2026, secara umum capaian kinerja menunjukkan variasi tingkat pencapaian pada masing-masing indikator. Beberapa indikator telah mencapai target akhir Renstra, sementara sebagian lainnya masih memerlukan peningkatan kinerja yang signifikan. Indeks Risiko Bencana (IRB) terealisasi sebesar 180,09 dari target akhir Renstra 2024–2026 sebesar 117,68, atau mencapai 153,03 persen. Capaian tersebut

menunjukkan bahwa nilai IRB masih berada di atas target yang ditetapkan, sehingga upaya pengurangan risiko bencana perlu terus ditingkatkan. Potensi penduduk terpapar bencana terealisasi sebesar 6.892 jiwa dari target akhir 12.548 jiwa atau sebesar 54,93%, yang menunjukkan bahwa upaya pengurangan jumlah penduduk terpapar masih perlu ditingkatkan.

Pada aspek potensi kerugian, realisasi kerugian fisik sebesar Rp90.018.170.000 dibandingkan target akhir Rp2.000.000.000 atau sebesar 4,5%, realisasi kerugian ekonomi sebesar Rp32.882.745.000 dibandingkan target akhir Rp109.058.100.000 atau sebesar 4,54%, serta realisasi kerugian lingkungan sebesar 30 dibandingkan target akhir 55.157 atau sebesar 0,05%. Capaian pada ketiga indikator ini menunjukkan bahwa pengendalian potensi kerugian akibat bencana masih belum optimal dan memerlukan penguatan program mitigasi serta pengurangan risiko bencana secara lebih terintegrasi. Pada aspek kapasitas, jumlah dokumen pendukung telah mencapai target dengan realisasi 5 dokumen dari target 5 dokumen atau sebesar 100%. Persentase kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan juga telah mencapai target dengan realisasi 100% dari target 100%, yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan. Namun demikian, indikator jumlah regulasi belum terealisasi, dengan capaian 0 dari target 2 regulasi atau sebesar 0%, sehingga diperlukan percepatan dalam penyusunan dan penetapan regulasi pendukung.

Selanjutnya, jumlah Desa Tangguh Bencana yang terealisasi sebanyak 5 desa dari target akhir 16 desa atau sebesar 31,25%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengembangan Desa Tangguh Bencana masih perlu ditingkatkan agar target akhir Renstra dapat tercapai. Secara keseluruhan, meskipun beberapa indikator telah mencapai target akhir Renstra, sebagian besar indikator utama yang berkaitan dengan pengurangan risiko dan potensi kerugian bencana

masih menunjukkan capaian yang relatif rendah. Oleh karena itu, pada Tahun 2026 diperlukan penguatan strategi, percepatan pelaksanaan program, serta peningkatan efektivitas intervensi untuk memastikan seluruh target akhir Renstra BPBD Tahun 2024–2026 dapat dicapai secara optimal.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja BPBD terhadap tolok ukur yang berlaku secara nasional. Khusus bagi Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM), perbandingan ini dilakukan dengan mengacu pada capaian SPM sebagai standar pelayanan yang wajib dipenuhi. Hasil perbandingan ini memberikan gambaran mengenai posisi capaian kinerja daerah dibandingkan standar nasional serta menjadi dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kinerja ke depan. Uraian perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 3.4
Membandingkan Realisasi Kinerja
Tahun 2025 Standar Pelayanan Minimal

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target SPM	Persentase %
Berkurangnya Kerentanan Bencana	Indeks Risiko Bencana	180,09	100	95,87
	Potensi Penduduk Terpapar	6.892		
	Potensi Kerugian :			
	Fisik	90.018.170.000		
	Ekonomi	32.882.745.000		
	Lingkungan	30		
	Kapasitas :			
	Jumlah Dokumen	5		
	Jumlah Regulasi	0		
	Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan	100		
	Jumlah Desa tangguh bencana	5		

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis Berkurangnya Kerentanan Bencana menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik, yang tercermin dari persentase capaian SPM sebesar 95,87% dari target sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar

standar pelayanan minimal di bidang kebencanaan telah terpenuhi, meskipun masih terdapat sebagian kecil indikator yang belum sepenuhnya tercapai. Indeks Risiko Bencana digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan tingkat kerentanan wilayah, yang secara umum sejalan dengan capaian SPM yang tinggi, sebagai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana. Potensi penduduk terpapar sebanyak 6.892 jiwa menunjukkan masih adanya masyarakat yang berada pada wilayah rawan bencana, sehingga diperlukan penguatan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan secara berkelanjutan.

Nilai potensi kerugian fisik sebesar Rp90.018.170.000 dan potensi kerugian ekonomi sebesar Rp32.882.745.000 menunjukkan bahwa dampak bencana masih cukup besar. Hal ini menjadi dasar perlunya peningkatan upaya pencegahan, perlindungan aset, dan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat. Pada aspek lingkungan, tercatat nilai sebesar 30, yang menunjukkan masih adanya potensi dampak lingkungan akibat kejadian bencana, sehingga diperlukan upaya rehabilitasi dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Dari sisi kapasitas, jumlah dokumen yang tersedia sebanyak 5 dokumen, sedangkan jumlah regulasi masih 0, yang menunjukkan bahwa aspek perencanaan telah tersedia, namun masih perlu diperkuat melalui penyusunan regulasi pendukung.

Selanjutnya, persentase kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan yang mencapai 100%, serta jumlah Desa Tangguh Bencana sebanyak 5 desa, menunjukkan keberhasilan dalam penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan di tingkat desa, yang turut mendukung pencapaian SPM. Secara keseluruhan, capaian persentase SPM sebesar 95,87% menunjukkan keberhasilan yang signifikan, namun tetap diperlukan upaya perbaikan dan penguatan pada beberapa aspek agar pemenuhan SPM dapat mencapai 100% pada periode berikutnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dtelah dilakukan

Analisis ini disusun untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan, serta terjadinya peningkatan atau penurunan kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana. Selain itu, analisis ini memuat alternatif solusi yang telah dilakukan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan. Uraian hasil analisis tersebut disajikan dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi	Rekomendasi
Berkurangnya Kerentanan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Masih minimnya resiko bencana alam kerusakan infrastruktur dan keanekaragaman hayati	Adanya peta zonasi rawan bencana dan rencana aksi daerah penanggulangan bencana	Penguatan pemanfaatan peta zonasi rawan bencana sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana perlu diimplementasikan secara konsisten dan terintegrasi lintas sektor, disertai dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala
	Potensi Penduduk Terpapar			
	Potensi Kerugian :			
	Fisik			
	Ekonomi			
	Lingkungan			
	Kapasitas :			
	Jumlah Dokumen			
	Jumlah Regulasi			
	Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan			
	Jumlah Desa tangguh bencana			

Beberapa keberhasilan/kegagalan atau peningkatan dan penurunan kinerja serta alternative solusi yang terjadi selama tahun 2025 dimana dari 4 indikator kinerja yang terdiri dari 2 Indikator yang mendukung keberhasilan pengurangan resiko bencana bagi warga di Kabupaten Sikka sedangkan 2 indikator lainnya mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan dalam Renstra BPBD Tahun 2024-2026, hal ini menunjukkan bahwa tingkat resiko bencana di Kabupaten Sikka masih tinggi.

- Indeks Resiko Bencana
Target 128,38 dengan Realisasi 180,09
- Potensi Penduduk Terpapar
Target 12.548 dengan Realisasi 6.892

- Potensi Kerugian terdiri dari:
 - ✓ Fisik
Target 2.500.000.0000 dengan Realisasi 90.018.170.000
 - ✓ Ekonomi
Target 120.840.000.000 dengan Realisasi 32.882.745.000
 - ✓ Lingkungan
Target 60.157 Ha dengan Realisasi 30 Ha
- Kapasitas terdiri dari:
 - ✓ Jumlah dokumen
Target 5 dengan Realisasi 5
 - ✓ Jumlah regulasi
Target 2 dengan Realisasi 0
 - ✓ Prosentasi kegiatan dan mitigasi dan kesiapsiagaan
Dengan Target 100 persen dan Realisasi 100 persen.
 - ✓ Jumlah desa tangguh bencana
Target 12 Desa dengan Realisasi 5 Desa

Analisis penyebab kegagalan kinerja tahun 2025 lain:

- ❖ Masih tingginya tingkat resiko bencana di wilayah Kabupaten Sikka
- ❖ Belum tersedianya dokumen kebencanaan
- ❖ Kurangnya alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan kebencanaan

Analisis penyebab keberhasilan kinerja tahun 2025:

- ❖ Tingkat kesadaran masyarakat akan resiko bencana semakin baik
- ❖ Adanya sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat di wilayah rawan bencana
- ❖ Adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanggulangan bencana

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, waktu, serta sarana dan

prasarana dalam mendukung pencapaian kinerja, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan yaitu dukungan sumber daya manusia yang tersedia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 33 orang yang terdiri dari Kepala Pelaksana yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, dengan jumlah pegawai seluruhnya baik ASN maupun Tenaga Honorer sebanyak 33 orang, terdiri dari ASN sebanyak 23 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 10 orang. Dari sumber daya yang ada dimanfaatkan untuk penanganan penanggulangan bencana pada masa pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. Personil yang ada belum semuanya terlatih baik secara manajemen maupun Teknik penanggulangan bencana, sehingga keberadaan sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sikka belum memenuhi standar petugas penanggulangan bencana.

b. Sumber Daya Keuangan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2024 dialokasikan dana untuk Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah sebesar Rp.3.592.697.764,- dan terealisasi sebesar RP. 3.227.311.080,- atau 89,83 %, dan sisah anggaran sebesar : Rp. 365.386.684.- atau 10,17 %

c. Efisiensi Anggaran

Dari aloksi anggaran untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp.3.592.697.764,- sampai dengan 31 Desember 2024 terrealisasi sebesar RP. 3.227.311.080,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 365.386.684.- hal ini menunjukkan efisiensi anggaran tahun 2024 sebesar 10,17 persen .

d. Sumber daya sarana prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka perlu mendapat dukungan sarana dan prasarana yang memadai, namun hingga saat ini jumlah sarana dan prasarana yang ada masih sangat kurang sehingga sangat mengganggu pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat bila terjadi bencana. Gedung kantor yang dipakai sekarang adalah milik Dinas Sosial Kabupaten Sikka juga dalam keadaan yang sangat memprihatinkan (rusak), belum memiliki garasi mobil, mobil tangki yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga hanya satu unit, sehingga pada saat terjadi bencana akan kesulitan dalam mengakses air minum bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Sarana prasarana dalam rangka mendukung upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sarana penanggulangan bencana dan sarana keselamatan petugas belum memadai ketersediaan pada BPBD Kabupaten Sikka. Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana prasarana ini sangat membutuhkan jumlah alokasi anggaran yang besar.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan ini disusun untuk menggambarkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian pernyataan kinerja. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Berdasarkan Renstra 2024-2026

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Berkurangnya Kerentanan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	153.618.200
		Potensi Penduduk Terpapar		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	115.915.600

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		Potensi Kerugian :		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	471.720.060
		Fisik		Penataan Sistim dasar Penanggulangan Bencana	74.999.430
		Ekonomi			
		Lingkungan			
		Kapasitas :			
		Jumlah Dokumen			
		Jumlah Regulasi			
		Prosentase kegiatan Mitigasi dan Kesiapsiagaan			
		Jumlah Desa tangguh bencana			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.264.970
2	Meningkatkan Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks profesional ASN		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.986.752.934
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	228.396.220
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	43.707.920
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.526.490
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.795.945

3.1.2 Analisis Sesuai Indikator Kinerja Utama 2025 Berpedoman Pada Dokumen Renstra BPBD Tahun 2025-2029

1. Analisis Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 disusun untuk menilai tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Perbandingan ini memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara rencana dan hasil pelaksanaan kinerja, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 3.6
Analisis Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana	140,81	180,09	127,89
		Potensi Penduduk Terpapar	34,092	6.892	20,21
		Potensi Kerugian Ekonomi	1.000.000.000	32.882.745.000	3,28
		Potensi Kerugian Fisik	1.000.000.000	90.018.170.000	9,00
		Potensi Kerugian Lingkungan	100	30	30
		Indeks Ketahanan Daerah	0,44	0,55	1,25
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,5	-	-

Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025, capaian pada masing-masing sasaran strategis menunjukkan hasil yang beragam. Pada sasaran berkurangnya risiko bencana, indikator jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian lingkungan berada di bawah target yang ditetapkan, sehingga mencerminkan capaian kinerja yang baik. Selain itu, Indeks Ketahanan Daerah telah melampaui target, yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Namun demikian, potensi kerugian ekonomi dan fisik pada Tahun 2025 masih jauh melampaui target, yang mengindikasikan tingginya dampak bencana terhadap sektor ekonomi dan infrastruktur, serta menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko pada aspek tersebut masih perlu diperkuat. Sementara itu, untuk indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, data realisasi Tahun 2025 belum tersedia, sehingga capaian kinerja pada indikator ini belum dapat dievaluasi secara kuantitatif. Oleh karena itu, penilaian terhadap indikator SAKIP akan dilakukan setelah hasil evaluasi resmi tersedia.

Secara keseluruhan, kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif pada aspek peningkatan ketahanan daerah dan penurunan jumlah penduduk terpapar. Namun, masih diperlukan penguatan langkah-langkah strategis dan intervensi yang lebih terarah untuk menekan potensi kerugian ekonomi dan fisik akibat bencana, serta untuk meningkatkan kualitas tata kelola kinerja setelah nilai SAKIP Tahun 2025 ditetapkan secara resmi.

2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi tahun 2024

Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun 2024 dilakukan untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja antarperiode serta menilai perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Perbandingan ini memberikan gambaran mengenai peningkatan maupun penurunan kinerja pada masing-masing indikator, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.7
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2025 dan 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana	140,81	180,09	141,81
		Potensi Penduduk Terpapar	34,092	6.892	10.000
		Potensi Kerugian Ekonomi	1.000.000.000	32.882.745.000	120.000.000.000
		Potensi Kerugian Fisik	1.000.000.000	90.018.170.000	1.500.000.000.000
		Potensi Kerugian Lingkungan	100	30	50.000
		Indeks Ketahanan Daerah	0,44	0,55	00,44
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,5	-	72,06

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024, pada sasaran berkurangnya risiko bencana terdapat beberapa indikator yang menunjukkan perbaikan, indeks risiko bencana tahun 2025 ditargetkan sebesar 140,81, namun realisasi mencapai 180,09 sehingga belum memenuhi target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 141,81, nilai tersebut menunjukkan peningkatan risiko bencana, sehingga diperlukan penguatan upaya

pengurangan risiko bencana ke depan, namun masih terdapat indikator yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Realisasi jumlah penduduk terpapar pada Tahun 2025 menurun dibandingkan Tahun 2024, yang mencerminkan perbaikan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Selain itu, potensi kerugian ekonomi juga mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024, meskipun nilainya masih jauh di atas target yang ditetapkan. Indeks Ketahanan Daerah pada Tahun 2025 meningkat dibandingkan Tahun 2024 dan telah melampaui target, yang menunjukkan adanya penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Sementara itu, potensi kerugian lingkungan mengalami penurunan yang signifikan, yang mencerminkan perbaikan dalam pengendalian dampak lingkungan akibat bencana. Namun demikian, potensi kerugian fisik pada Tahun 2025 meningkat dibandingkan Tahun 2024 dan masih jauh melampaui target, sehingga memerlukan penguatan upaya mitigasi untuk menekan dampak kerusakan fisik. Pada sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, data realisasi Nilai SAKIP Tahun 2025 belum tersedia, sehingga capaian indikator ini belum dapat dievaluasi secara kuantitatif. Secara keseluruhan, kinerja Tahun 2025 menunjukkan perbaikan pada beberapa indikator utama, namun masih diperlukan penguatan strategi untuk menekan potensi kerugian fisik dan ekonomi akibat bencana.

3. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir yang terdapat dalam Dokumen Renstra BPBD Tahun 2025-2029

Analisis perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target akhir yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2025–2029 dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja. Perbandingan ini memberikan gambaran kesesuaian antara capaian kinerja hingga tahun

2025 dengan target akhir Renstra, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2025 Dengan Target Akhir Terdapat Pada Renstra BPBD
Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra 2025-2029	Persentase %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana	180,09	138,81	129,73
		Potensi Penduduk Terpapar	6.892	20,458	33,69
		Potensi Kerugian Ekonomi	32.882.745.000	600.000.000	5,48
		Potensi Kerugian Fisik	90.018.170.000	600.000.000	15,00
		Potensi Kerugian Lingkungan	30	60	50
		Indeks Ketahanan Daerah	0,55	0,44	1,25
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	80	0

Berdasarkan perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir dalam Renstra BPBD Tahun 2025–2029, capaian kinerja menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa indikator telah menunjukkan arah pencapaian yang positif, namun sebagian lainnya masih memerlukan penguatan upaya agar target akhir dapat tercapai secara optimal. Pada sasaran berkurangnya risiko bencana, indikator Indeks Risiko Bencana indikator pada indikator indeks risiko bencana (IRB), realisasi tahun 2025 tercatat sebesar 180,09 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025–2029 sebesar 138,81, sehingga capaian kinerja mencapai 129,73 persen. Nilai realisasi yang masih berada di atas target menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana masih relatif tinggi. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan upaya pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan melalui peningkatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan kapasitas penanggulangan bencana. Potensi Penduduk Terpapar terealisasi sebesar 6.892 jiwa dari target akhir 20.458 jiwa atau 33,69%, yang menunjukkan bahwa upaya pengurangan penduduk terpapar telah berjalan, namun masih perlu ditingkatkan. Potensi Kerugian Ekonomi dan Potensi Kerugian Fisik masing-masing terealisasi sebesar Rp32.882.745.000 dan

Rp90.018.170.000, yang masih jauh di atas target akhir masing-masing sebesar Rp600.000.000, sehingga menunjukkan bahwa dampak ekonomi dan kerusakan fisik akibat bencana masih tinggi dan memerlukan penguatan strategi mitigasi. Potensi Kerugian Lingkungan terealisasi sebesar 30 dari target akhir 60 atau 50%, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam pengendalian dampak lingkungan. Indeks Ketahanan Daerah terealisasi sebesar 0,55 dan telah melampaui target akhir 0,44, yang mencerminkan peningkatan kapasitas daerah dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Sementara itu, realisasi Indeks Risiko Bencana dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 belum tersedia, sehingga capaian terhadap kedua indikator tersebut belum dapat dievaluasi. Secara keseluruhan, kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik pada aspek ketahanan daerah dan pengendalian dampak lingkungan, namun masih diperlukan penguatan kebijakan dan percepatan program mitigasi untuk menekan potensi kerugian ekonomi dan fisik agar target akhir Renstra BPBD Tahun 2025–2029 dapat tercapai secara optimal

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional

Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian kinerja BPBD terhadap tolok ukur yang berlaku secara nasional. Khusus bagi Perangkat Daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM), perbandingan ini dilakukan dengan mengacu pada capaian SPM sebagai standar pelayanan yang wajib dipenuhi. Hasil perbandingan ini memberikan gambaran mengenai posisi capaian kinerja daerah dibandingkan standar nasional serta menjadi dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kinerja ke depan. Uraian perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 3.9
Membandingkan Realisasi Kinerja
Tahun 2025 Standar Pelayanan Minimal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target SPM	Persentase %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana	180,09	100	95,87
		Potensi Penduduk Terpapar	6.892		
		Potensi Kerugian Ekonomi	32.882.745.000		
		Potensi Kerugian Fisik	90.018.170.000		
		Potensi Kerugian Lingkungan	30		
		Indeks Ketahanan Daerah	0,55		
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,06		

Pada tahun 2025 penyelenggaraan penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten Sikka telah disesuaikan dengan standar pelayanan minimal yang berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota. Target pelayanan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan alokasi anggaran dan program kegiatan yang ada pada BPBD Kabupaten Sikka harus dapat dicapai secara maksimal yaitu sebesar 100 persen. Realisasi terhadap target yang ditetapkan sebesar 95,87 persen. Capaian realisasi belum mencapai 100 persen disebabkan oleh penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan termaksud didalamnya adalah mitigasi dan perencanaan belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, sarana prasarana dan sumber daya manusia. Faktor pendukung kurang maksimalnya capaian target standar pelayanan minimal disebabkan oleh luas wilayah Kabupaten Sikka dengan topografi yang beragam. Capaian ini dapat dilaksanakan secara maksimal jika didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, SDM dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana termaksud menghadapi tantangan luas wilayah dengan beragam topografi.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dtelah dilakukan

Analisis ini disusun untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan, serta terjadinya peningkatan atau penurunan kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana. Selain itu, analisis ini memuat alternatif solusi yang telah dilakukan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan. Uraian hasil analisis tersebut disajikan dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penyebab Keberhasilan/kegagalan	Alternatif Solusi	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana	Penanggulanga n bencana belum optimal	Peningkatan kapasitas dan ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,	Penyusunan Dokumen kebencanaan,pe latihan dan peningkatan sarana prasarana
		Potensi Penduduk Terpapar			
		Potensi Kerugian Ekonomi			
		Potensi Kerugian Fisik			
		Potensi Kerugian Lingkungan			
		Indeks Ketahanan Daerah			
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			

Beberapa keberhasilan/kegagalan atau peningkatan dan penurunan kinerja serta alternative solusi yang terjadi selama tahun 2025 dimana dari 4 indikator kinerja yang terdiri dari 2 Indikator yang mendukung keberhasilan pengurangan resiko bencana bagi warga di Kabupaten Sikka sedangkan 2 indikator lainnya mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan dalam Renstra BPBD Tahun 2025-2029, hal ini

menunjukkan bahwa tingkat resiko bencana di Kabupaten Sikka masih tinggi.

- Indeks Resiko Bencana
 - Target 140,81 dengan Realisasi 180,09
- Potensi Penduduk Terpapar
 - Target 34.092 dengan Realisasi 6.892
- Potensi Kerugian;
 - ✓ Fisik
 - Target 1.000.000.000 dengan Realisasi 90.018.170.000
 - ✓ Ekonomi
 - Target 1.000.000.000 dengan Realisasi 32.882.745.000
 - ✓ Lingkungan
 - Target 100 Ha dengan Realisasi 30 Ha
- Indeks Ketahanan Daerah
 - Target 0,44 dengan Realisasi 0,55
- Nilai Sakip
 - Target 72,5 dan Realisasi (belum dilakukan rewiuw dari Inspektorat)

Dalam pencapaian sasaran strategis berupa berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat belum optimal dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka. Pelaksanaan penanggulangan bencana menghadapi kendala yang disebabkan oleh kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan penanggulangan bencana belum memadai. Faktor tidak memadai bisa diukur secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu penyelenggaraan penanggulangan bencana menemui kendala kurangnya sarana prasarana dan belum adanya dokumen perencanaan penanggulangan bencana seperti RPB, RPKB, Renkon, Renops dan dokumen lainnya yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Untuk dapat mencapai penyelenggaraan penanggulangan bencana yang optimal maka dibutuhkan peningkatan kapasitas dan ketersediaan sumber daya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penyusunan Dokumen kebencanaan, pelatihan dan peningkatan sarana prasarana.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk menilai pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, waktu, serta sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian kinerja, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan yaitu dukungan sumber daya manusia yang tersedia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 38 orang yang terdiri dari Kepala Pelaksana yang membawahi 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Bidang, dengan jumlah pegawai seluruhnya baik ASN, ASN maupun Tenaga Honorer sebanyak 38 orang, terdiri dari PNS sebanyak 22 orang PPPK 11 Orang, CPNS 4 Orang dan PPPK paru waktu sebanyak 1 orang. Pada posisi tanggal 31 Desember 2025, jumlah aparatur sipil negara (ASN) pada BPBD Kabupaten Sikka tercatat sebanyak 36 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat pengurangan pegawai yang disebabkan oleh 1 (satu) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang memasuki masa pensiun. Dari sumber daya yang ada dimanfaatkan untuk penanganan penanggulangan bencana pada masa pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. Personil yang ada belum semuanya terlatih baik secara manajemen maupun Teknik penanggulangan bencana, sehingga keberadaan sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sikka belum memenuhi standar petugas penanggulangan bencana.

b. Sumber Daya Keuangan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025 dialokasikan dana untuk Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan

Dasar, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah sebesar Rp.3.115.376.419,- dan terealisasi sebesar RP. 2.736.544.700,- atau 87,84 %, dan sisah anggaran sebesar : Rp. 378.831.719.- atau 12,16 %

c. Efisiensi Anggaran

Dari aloksi anggaran untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp.3.115.376.419,- sampai dengan 31 Desember 2025 terrealisasi sebesar RP. 2.736.544.700,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. Rp. 378.831.719.- hal ini menunjukkan efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar 12,16 persen.

d. Sumber daya sarana prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka perlu mendapat dukungan sarana dan prasarana yang memadai, namun hingga saat ini jumlah sarana dan prasarana yang ada masih sangat kurang sehingga sangat mengganggu pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat bila terjadi bencana. Gedung kantor yang dipakai sekarang adalah milik Dinas Sosial Kabupaten Sikka juga dalam keadaan yang sangat memprihatinkan (rusak), belum memiliki garasi mobil, mobil tangki yang di miliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga hanya satu unit, sehingga pada saat terjadi bencana akan kesulitan dalam mengakses air minum bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Sarana prasarana dalam rangka mendukung upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sarana penanggulangan bencana dan sarana keselamatan petugas belum memadai ketersediaan pada BPBD Kabupaten Sikka. Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana prasarana ini sangat membutuhkan jumlah alokasi anggaran yang besar.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjukkan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis ini disusun untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi tingkat keberhasilan maupun kendala yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja, yang

selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai dasar dalam perumusan perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode berikutnya:



Tabel 3.11

EVALUASI HASIL RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 TRIWULAN 4

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Ouput)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I		II			III		IV					
											K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12=8+9+10+11	15										
	BPB D			100	4.395 .342. 033	1 0 0	3.090 .907. 315	100	3.115.376.4 19	-	33	751. 675. 266	-	47	642.02 2.516	-	37	246.58 8.045	15	1.096.2 58.873	66	2.736.5 44.700	
			Indeks Risiko Bencana	138,3 1				140,8 1	180.09														
			Potensi penduduk terpapar :	19				34.09 2	6.892														
			Potensi kerugian :																				
			a. Fisik	500.0 00.00 0				1.000. 000.0 00	90.018.170. 000														
			b. Ekonomi	500.0 00.00 0				1.000. 000.0 00	2.882.745.000														
			c. Lingkung an	50				100	30,00														
			d. Indeks Ketahanan Daerah					0,44	0,55														
			Nilai Sakip PD	82,00				725	72,06														

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I			II			III		IV				
											K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	3.922.958.513	100	2.569.575.073	100	2.599.047.019	25	24	739.405.266	18	17	567.480.016	15	15	189.910.604	15	832.178.290	71	2.328.974.176	Sekretariat
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100	28.164.745	100	16.155.450	100	19.373.200	50	50	4.002.000	17	17	-	17	17	-	17	15.324.200	101	19.326.200	Sekretariat

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I			II			III		IV				
											K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																				
			Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah (Dokumen)	6		0	0	0		-	0		-	0		-					-	-	
		Sub kegiatan Penyusun an Dokumen Perencan aan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah (Dokumen)	6	0	0	0	0		-	0		-	0		-					-	-	
		Koordinas i dan Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	6	28.16 4.745	6	16.15 5.450	6	19.373.200	50	3	4.00 2.00 0	### ###	1	-	16,67	1	-	1	15.324. 200	6	19.326. 200	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I			II			III		IV				
											K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	100	3.336 .989. 252	100	1.850 .945. 779	100	1.951.761.0 91	27	23	602. 024. 065	27	23	480.71 1.032	23	23	144.51 1.725	23	520.36 7.389	92	1.747.6 14.211	Sekretariat
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	0	0		0		0	0		0			0			0		-	-	
		Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	3.140 .852. 560	14	1.804 .805. 779	14	1.877.073.0 91	29	4	581. 554. 065	29	4	464.67 6.032	21	3	139.64 2.725	3	487.05 5.389	14	1.672.9 28.211	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV				
											K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			(Orang/bulan)																				
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	196.136.692	12	46.140.000	12	74.688.000	25	3	20.470.000	25	3	16.035.000	25	3	4.869.000	3	33.312.000	12	74.686.000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase dokumen admistrasi, komponen listrik dan peralatan kantor serta paket cetakan dan penggandaan	100	140.876.727	100	190.280.070	100	133.513.500	10	10	9.740.000	15	15	4.459.000	5	5	2.495.000	70	114.909.239	100	131.603.239	Sekretariat
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	140.876.727	0		0		-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Ouput)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV				
											K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	0	0		0		-	0		-			-					-	-	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	0	0		0		-	0		-			-					-	-	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	0	0		0		-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Ouput)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I			II			III		IV				
											K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7			8		9		10	11		12=8+9+10+11	15						
		Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	5.654.940	4	2.220.000	4	1.712.700	-	-	-	-	0	-	-	0	-	4	1.199.000	4	1.199.000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	12.161.839	21	7.280.050	20	7.584.600	-	0	-	-	-	-	-	0	-	20	7.402.550	20	7.402.550	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	19.911.760	12	14.926.380	12	10.500.000	25	3	2.070.000	25	3	1.875.000	25	3	2.495.000	3	4.030.000	12	10.470.000	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	14.599.420	12	10.318.000	12	6.751.200	-	0	-	50	6	2.584.000	-	0	-	6	4.167.200	12	6.751.200	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I			II			III		IV				
											K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sentase	K			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sentase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
		Penyelen ggaraan Rapat Koordinas i dan Konsultasi SKPD	Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	88.54 8.768	12	155.5 35.64 0	12	106.965.000	25	3	7.67 0.00 0	-	-	-	-	0	-	9	98.110. 489	12	105.78 0.489	
		Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah	Presentase unit pengadaan barang dan jasa	100		100	39.85 5.000	100	14.338.800	-	0	-	-	0	-	-	0	-	100	14.102. 550	100	14.102. 550	Sekreta riat
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	45.00 0.000	0		0		-	0	-	-			-				-	-		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	0	0		0		-	0	-	-			-				-	-		
		Sub kegiatan Pengadaa n Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	4	30.00 0.000	4	12.76 8.000	4	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	0	-	-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV				
											K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			Disediakan (Unit)																				
		Pengadaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	15.00 0.000	2	27.08 7.000	4	14.338.800	-	0	-	-	0	-	-	0	-	4	14.102. 550	4	14.102. 550	
		Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	Presentase dokumen laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air, listrik dan pelayanan umum kantor	100		1 0 0	49.98 6.100	100	92.434.848	25	25	15.6 85.5 37	25	25	10.223 .557	25	25	7.239. 809	25	37.469. 819	100	70.618. 722	Sekreta riat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	134.9 16.20 6	0		0		-	0	-				-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I			II			III		IV				
											K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	0	0		0		-	0		-			-					-	-	
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	51.18 5.826	1 2	24.64 2.750	12	63.944.860	25	3	6.54 8.74 1	25	3	3.370. 960	25	3	4.613. 610	3	34.453. 120	12	48.986. 431	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	83.73 0.380	1 2	25.34 3.350	12	28.489.988	25	3	9.13 6.79 6	25	3	6.852. 597	25	3	2.626. 199	3	3.016.6 99	12	21.632. 291	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penanggung jawab
											I			II			III		IV				
											K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase unit peralatan dan mesin, kendaraan dan gedung kantor	100		100	422.352.674	100	387.625.580	38	38	107.953.664	23	22	72.086.427	18	18	35.664.070	22	130.005.093	100	345.709.254	Sekretariat
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	237.011.583	0		0		-	0		-			-					-	-	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	0	0		0		-	0		-			-					-	-	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	0	0		0		-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab		
											I			II			III					IV	
											K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp				Prese ntase	K
1	2	3	4	5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
		Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	209.760.143	12	407.674.174	12	378.025.580	25	3	107.428.664	25	3	71.786.427	25	3	35.414.070	3	126.375.093	12	341.004.254	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	8.784.600	10	4.035.000	10	9.600.000	50	5	525.000	20	2	300.000	10	1	250.000	2	3.630.000	10	4.705.000	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D	2	18.466.840	1	10.643.500	1	-	-	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penanggun g jawab
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV				
											K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		Pre sent ase	8		Pre sent ase	9			10		11		12=8+9+10+11		15
			irehabilitasi (Unit)																				
	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Penagnanan Bencana	100	472.383.520	100	521.332.242	100	516.329.400	9	9	12.270.000	30	30	74.542.500	22	22	56.677.441		264.080.583	61	407.570.524	BPBD
			Persentase penanganan pra bencana (%)	100	472.383.520																-	-	
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)	600	0																-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV				
											K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			Jumlah warga negara yang memperole h layanan penyelamat an dan evakuasi korban bencana (Orang)	300	0																-	-	
			Jumlah warga negara yang memperole h layanan informasi rawan bencana (Orang)	600	0																-	-	
			Persentase pendamping an penangana n tanggap darurat bencana (%)	100	0																-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I			II			III		IV				
											K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			Persentase Penangan an Pasca Bencana (Persentase)	100	0																-	-	
		Pelayana n Informasi Rawan Bencana Kabupate n/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	100	79.68 0.354		-	100	156.823.100	-	0	-	50	50	920.00 0	-		46.550 .000	50	73.184. 296	100	120.65 4.296	Bidang Penceg ahan dan Kesiap siagaan
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang memperole h sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1	600	79.68 0.354	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab		
								Tahun Berjalan (2025)			I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III					IV	
								K	Rp														
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			(satu) tahun (Orang)																				
		Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana	600	79.68 0.354	0		400	61.562.600	-	-	-	100	400	920.00 0	-	-	46.550 .000	-	1.328.4 20	400	48.798. 420	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I			II			III		IV				
											K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K			
1	2	3	4	5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)																				
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	-	0		1	95.260.500	-	0	-	-	0	-	-	0	-	1	71.855.876	1	71.855.876	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100		100		100	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota	-	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Ouput)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV				
											K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	RP	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)																				
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV				
											K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan- kawasan strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiaga an menghadapi	-	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I			II			III		IV				
											K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			bencana (Kawasan)																				
			Jumlah kegiatan penyelesaia n akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/ Kota yang tertangani (Kegiatan)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	-	0	1 0	31.10 7.625	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-			-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I			II			III		IV				
				K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	3	0	0				-	0		-			-					-	-	
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat	3	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV				
											K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			tinggalnya (Unit)																				
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggula ngan Bencana (TRC PB) Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penangana n awal darurat bencana (Orang)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV				
											K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV				
											K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			Kabupaten/ Kota (Orang)																				
		Sub kegiatan Pengelola an Risiko Bencana Kabupate n/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaia n akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/ Kota yang tertangani (Kegiatan)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
		Penyedia an Peralatan Perlindun gan dan Kesiapsia gaan	Jumlah Peralatan Penyelamat an Diri bagi Individu Warga Negara,	3	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Ouput)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV				
											K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
		Terhadap Bencana kabupaten /kota	Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)																				
		Gladi Kesiapsia gaan Terhadap Bencana kabupaten /kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiaga an untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsi an sarana prasarana dalam pengendalia n operasi penangana n darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/ Kota (Orang)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV				
											K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
		Penguata n Kapasitas Kawasan untuk Pencegah an dan Kesiapsia gaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan- kawasan- strategis Kabupaten/ Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiaga a	-	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV				
											K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/ Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	0	0	17.76 5.570	0	-	-	0		-	0	-	-	0	-			-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab		
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III					IV	
											K	Rp		K	Rp		K	Rp				K	Rp
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai	3	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Ouput)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV				
											K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)																				
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase dokumen respon cepat dan logistik	100		100	401.581.797	100	271.328.100	13	13	12.270.000	46	46	73.122.500	63	63	1.927.441	13	111.802.087	135	199.122.028	Bidang Kedaruratan dan Logistik

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I			II			III		IV				
											K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarka n Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	3	335.7 03.16 6	0				-	0		-			-					-	-	
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penangana	-	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I			II			III		IV				
				K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			n keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)																				
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarka n Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiolog i Terpadu (Dokumen)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV				
											K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		Pre sent ase	8		Pre sent ase	9			10		11		12=8+9+10+11		15
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatka n Distribusi Logistik Penyelamat an dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	100	0	0				-	0		-			-					-	-	
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian	-	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I			II			III		IV				
				K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			Luar Biasa Penyakit/W abah Prioritas (Laporan)																				
			Jumlah Laporan Pelaksanaa n Aktivasi Sistem Komando Penangana n Darurat Bencana Kanupaten/ Kota (Laporan)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
		Sub kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/W abah Prioritas (Laporan)	-	0	0				-	0		-	-		-					-	-	
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupate n/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan	3	250.0 00.00 0	3	221.1 13.37 7	3	198.073.700	-	0	12.2 70.0 00	67	2	73.122 .500	100	3	1.927. 441	0	84.839. 416	5	172.15 9.357	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I			II			III		IV				
											K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)																				
		Pencarian , Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
		Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal (Dokumen)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV				
											K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		Pre sent ase	8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
		Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangan an keadaan darurat Kabupate n/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penangana n keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
		Penyedia an Logistik Penyelam atan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupate n/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatka n Distribusi Logistik Penyelamat an dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	100	85.70 3.166	1 2	180.4 68.42 0	100	73.254.400	25	25	-	25	25	-	25	25	-	25	26.962. 671	100	26.962. 671	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab		
											I			II			III					IV	
											K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp				K	Rp
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarka n Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiolog i Terpadu (Dokumen)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
		Aktivasi Sistem Komando Penangan an Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaa n Aktivasi Sistem Komando Penangana n Darurat Bencana	-	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I			II			III		IV				
											K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K			
1	2	3	4	5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			Kanupaten/ Kota (Laporan)																				
		Penataan Sistem Dasar Penanggu ngan Bencana	Presentase dokumen paskabencana, regulasi, pemanfaatan sistem dan peningkatan kapasitas aparatur	100	57.00 0.000	100	70.87 7.250	100	88.178.200	25	25	-	25	25	500.00 0	25	25	8.200. 000	25	79.094. 200	100	87.794. 200	Bidang Rehabil itasi dan Rekons truksi
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASN A) dan Rencana	-	57.00 0.000	1	70.87 7.250 ,0	12	88.178.200	25	3		25	3	500.00 0	25	3	8.200. 000	3	79.094. 200	12	87.794. 200	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab	
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV					
											K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15	
			Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)																					
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	-	0	0				-	0		-			-						-	-	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan	3	0	0				-	0		-			-						-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV				
											K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan (Kegiatan)																				
			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab		
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III					IV	
											K	Rp		K	Rp		K	Rp				K	Rp
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan	-	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV				
											K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)																				
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masvarakat.	-	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab		
											I			II			III					IV	
											K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp				Prese ntase	K
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)																				
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dokumen)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV				
											K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggula ngan Bencana (Dokumen)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
		Sub kegiatan Penyusun an Regulasi Penanggu langan Bencana Kabupate n/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelengg aaran Penanggula ngan Bencana di Daerah (Dokumen)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggu langan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggula ngan	-	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I			II			III		IV				
											K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7			8		9			10		11		12=8+9+10+11		15			
		Bencana Kabupate n/Kota	ngan Bencana (Dokumen)																				
		Pengelola an dan Pemanfaa tan Sistem Informasi Kebencan aan	Jumlah Data dan Informasi Kebencana an yang tersedia (Dokumen)	-	0	0				-	0		-			-				-	-		
		Pembinaa n dan Pengawas an Penyelen ggaraan Penanggu langan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyeleng garaan Penanggula ngan Bencana (Laporan)	-	0	0				-	0		-			-				-	-		
		Peningkat an Kapasitas SDM Aparatur Penanggu	Jumlah SDM aparatur penanggula ngan bencana yang	-	0	0				-	0		-			-				-	-		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kinerja dan anggaran Renja PD			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
								Tahun Berjalan (2025)			I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV				
								yang dievaluasi			K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
		langan Bencana	memiliki kompetensi (Orang)																				
		Bimbinga n Teknis Pasca Bencana Kabupate n/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/ Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASN A) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruk si Pascabencana (R3P) (Orang)	-	0	0				-	0	-				-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab	
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		K	IV				
											K	Rp		K	Rp		K	Rp		K				Rp
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15	
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	3	57.000.000	0				-	0		-			-					-	-		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab		
											I			II			III					IV	
											K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp				K	Rp
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
		Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar	-	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I			II			III		IV				
											K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			dan legal (Lembaga)																				
		Fasilitasi pengump ulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
		Penguata n Kelembag aan Bencana Kabupate n/Kota	Jumlah penyelesaia n dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan	-	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I		Pre sent ase	II		Prese ntase	III		IV				
											K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
			sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)																				
		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPAS NA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	0	0				-	0		-			-					-	-	
		Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar	-	0	0				-	0		-			-					-	-	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2024		Target Kineja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Unit PD penang gung jawab
											I			II			III		IV				
											K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	K	RP	K	RP	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Pre sent ase	K	Rp	Prese ntase	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5		6		7			8			9			10		11		12=8+9+10+11		15
		n Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupate n/Kota	Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/ Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)																				

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran merupakan gambaran pelaksanaan penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat realisasi anggaran menunjukkan sejauh mana alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran selama tahun anggaran berjalan. Adapun rincian pagu anggaran, realisasi anggaran, serta persentase capaian realisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini;



Tabel 3.12
Realisasi Anggaran

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	Presentase (%)	Target	Realisasi	Presentase (%)
1	Sasaran Strategis 1 (Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat)						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis						
	Indeks Risiko Bencana (Indeks)				140,81	180,09	127,89
	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				34.092	6.892	20,21
	Potensi Kerugian Ekonomi (Rp)				1.000.000.000	32.882.745.000	3,28
	Potensi Kerugian Fisik (Rp)				1.000.000.000	90.018.170.000	9,0
	Potensi Kerugian Lingkungan (Ha)				100	30	30
	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)				0,44	0,55	1,25
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	516.329.400	407.570.524		100	100	100
	Indikator Kinerja Program						
	Prosentase penanganan bencana						
	Persentase Penanganan pra bencana (%)						

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	Presentase (%)	Target	Realisasi	Presentase (%)
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Orang)				1317	1317	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)				1317	1317	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)				600	600	100
	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)						
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	156.823.100	120.654.296	76,94	100	100	100
	Indikator Kinerja Kegiatan (Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota)						
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	271.328.100	199.122.028	73,39	100	135	135
	Indikator Kinerja Kegiatan (Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana)						
	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	88.178.200	87.794.200	99,56	100	100	100

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	Presentase (%)	Target	Realisasi	Presentase (%)
	Indikator Kinerja Kegiatan (Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana)						
2	Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja pelayanan badan penanggulangan bencana)						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)				72,5	72,06	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.599.047.019	2.328.974.176	89,61	100	71	
	Indikator Kinerja Program						
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)						
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.373.200	19.326.200	99,76	100	100	100
	Indikator Kinerja Kegiatan (Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)						

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	Presentase (%)	Target	Realisasi	Presentase (%)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.951.761.091	1.747.614.211	89,54	100	92	92
	Indikator Kinerja Kegiatan (Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)						
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.513.500	131.603.239	98,57	100	100	100
	Indikator Kinerja Kegiatan (Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah)						
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.338.800	14.102.550	98,35	100	100	100
	Indikator Kinerja Kegiatan (Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Menunjang Urusan Pemerintah Daerah)						
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.434.848	70.618.722	76,4	100	100	100
	Indikator Kinerja Kegiatan (Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)						
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.625.580	345.709.254	89,19	100	100	100

No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	Presentase (%)	Target	Realisasi	Presentase (%)
	Indikator Kinerja Kegiatan (Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara)						





BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian perencanaan, perjanjian kinerja dan akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka tahun 2025 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Realisasi kinerja BPBD Kabupaten Sikka tahun 2025 sebesar 95,47% dengan pencapaian seluruh tujuan dan sasaran dari program kegiatan yang direncanakan tahun 2025.
- b. Realisasi keuangan BPBD kabupaten Sikka tahun 2025 sebesar Rp. 2.736.544.700,- atau 87,84 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.115.376.419-. Realisasi keuangan ini menunjukkan efisiensi anggaran sebesar: Rp. 378.831.719.- atau 12,16 %.

4.2 SARAN

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran BPBD Kabupaten Sikka tahun 2025 harus diprioritaskan penganggaran untuk pemenuhan terhadap sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Adapun hal-hal yang harus dipenuhi:

- a. Pengalokasian anggaran untuk dokumen perencanaan penanggulangan bencana yaitu RPB,RPKB,Renkon, Rencana Operasi dan dokumen kebencanaan lainnya harus menjadi prioritas dalam pemenuhan standar pelayanan minimal dan program penunjang indicator kinerja utama Pemerintah Daerah dan tindak lanjut dari hasil penyusunan kajian resiko bencana.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana khususnya berkaitan dengan manajemen bencana dan teknis penanggulangan bencana harus dilakukan secara rutin dan kontinyu untuk memastikan kesiapan BPBD dalam menghadapi setiap situasi bencana.
- b. Peningkatan alokasi anggaran untuk pengadaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti ketersediaan

Gudang, kendaraan lapangan, alat berat, peralatan keselamatan diri petugas dan warga (APD) , Gedung kantor yang memadai, sarana

- c. Penyediaan peringatan dini bencana dan rambu serta papan informasi bencana termasuk didalamnya adalah pemanfaatan teknologi dalam penanggulangan bencana.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2025 disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.





LAMPIRAN

1. RENCANA KERJA TAHUNAN 2025

RENCANA KERJA TAHUNAN 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana	Indeks	140,81
		Potensi Penduduk Terpapar	Jiwa	34,092
		Potensi Kerugian Ekonomi	Rupiah	1.000.000.000
		Potensi Kerugian Fisik	Rupiah	1.000.000.000
		Potensi Kerugian Lingkungan	Hektar	100
		Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,44
2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	72,5

Pihak Kedua

BUPATI SIKKA,



JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Maumere, 3 November 2025

Pihak Pertama

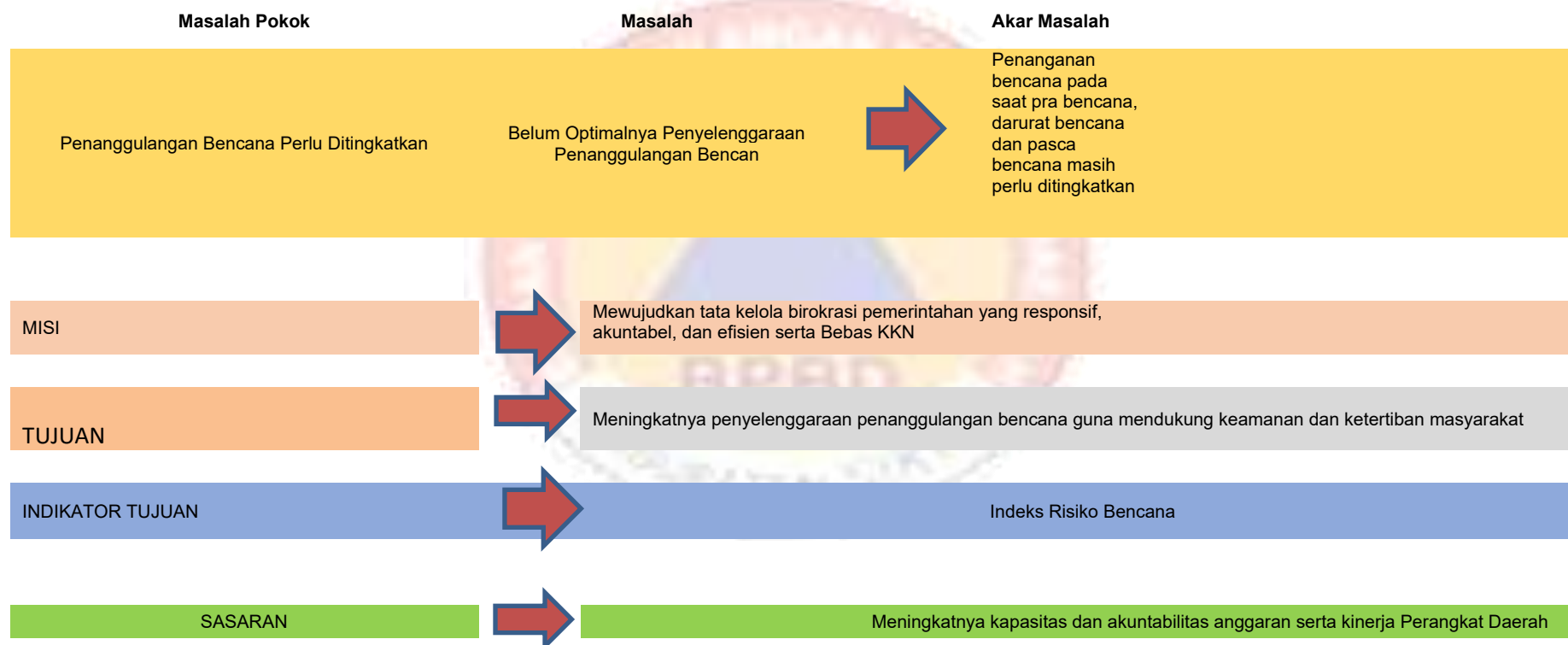
Pit. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka,

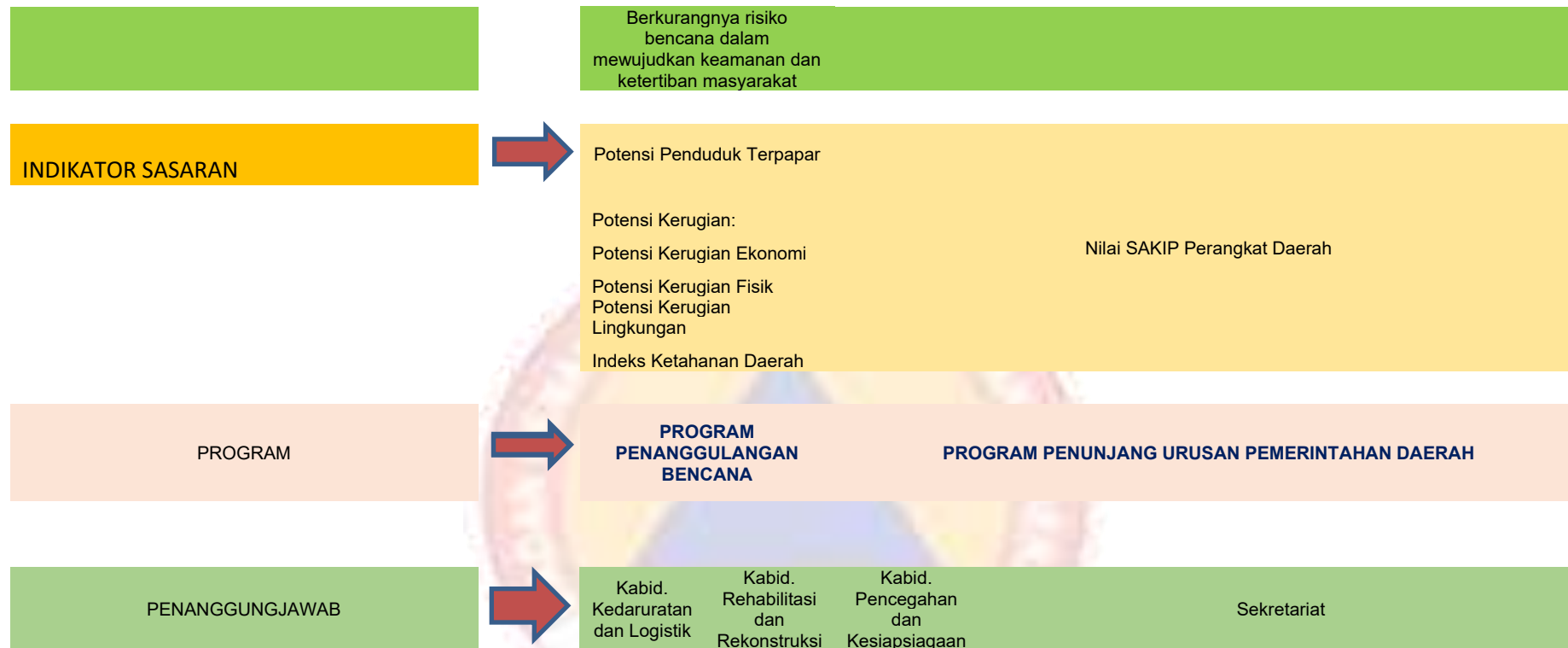


Johanes B.C. Putu Botha, ST
 Pembina Tingkat I
 NIP 19741115 200012 1 005

2. POHON KINERJA

POHON KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025





4. PERJANJIAN KINERJA BPBD



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **JOHANES BERKHMANS CHRISTOFORUS PUTU BOTHA, S.T.**

Jabatan : Plt.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

Nama : **JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO**

Jabatan : Bupati Sikka

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 3 November 2025

PIHAK KEDUA

BUPATI SIKKA,

JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

PIHAK KESATU,

Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka,

Johanes B.C. Putu Botha, ST
Pembina Tignkat I
NIP 19741115 200012 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana	140,81	
		Potensi Penduduk Terpapar	34,092	
		Potensi Kerugian Ekonomi	1.000.000.000	
		Potensi Kerugian Fisik	1.000.000.000	
		Potensi Kerugian Lingkungan	100	
		Indeks Ketahanan Daerah	0,44	
2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,5	
NO	PROGRAM	ANGGARAN		ASAL ANGGARAN
		Sebelum	Setelah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	2.956.189.136	2.599.047.019	APBD
2	Penanggulangan Bencana Daerah	557.398.700	516.329.400	APBD

Pihak Kedua,


Maumere, 3 November 2025
Pihak Kesatu,



RINCIAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN	
						Sebelum	Setelah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana	140,81	Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Penanggulangan Bencana	557.398.700	516.329.400
		Potensi Penduduk Terpapar	34,092				
		Potensi Kerugian Ekonomi	1.000.000.000				
		Potensi Kerugian Fisik	1.000.000.000				
		Potensi Kerugian Lingkungan	100				
		Indeks Ketahanan Daerah	0,44				
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,5	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.956.189.136	2.599.047.019

BUPATI SIKKA,
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

K. Pit. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka,
Johanes B.C. Putu Botha, ST
Pembina Tingkat I
NIP 19741115 200012 1 005

RENCANA KERJA TAHUNAN 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana	Indeks	140,81
		Potensi Penduduk Terpapar	Jiwa	34,092
		Potensi Kerugian Ekonomi	Rupiah	1.000.000.000
		Potensi Kerugian Fisik	Rupiah	1.000.000.000
		Potensi Kerugian Lingkungan	Hektar	100
		Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,44
2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	72,5

Pihak Kedua

BUPATI SIKKA,
JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO

Pihak Pertama

Pt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka,
Johanes B.C. Putu Botha, ST
Pembina Tngkat I
NIP 19741115 200012 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MUHAMAD NURUL KARIM, SH**

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : **JOHANES B.C.PUTU BOTHA, S.T.**

Jabatan : Plt.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 3 November 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

JOHANES B.C PUTU BOTHA, S.T.

Pembina Utama Muda
NIP.19741115 200012 1 005

MUHAMAD NURUL KARIM, SH

Penata Tingkat I
NIP. 19840522 201503 1 002

RINCIAN LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNTUK ADMINISTRATOR (ESELON III) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA
SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN	
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana	140,81	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Bencana	557.398.700	516.329.400
		Potensi Penduduk Terpapar	34,092				
		Potensi Kerugian Ekonomi	1.000.000.000				
		Potensi Kerugian Fisik	1.000.000.000				
		Potensi Kerugian Lingkungan	100				
		Indeks Ketahanan Daerah	0,44				
2	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.956.189.136	2.599.047.019

Pihak Kedua,

JOHANES B. C. PUTU BOTHA, S.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741115 200012 1 005

Maumere, 3 November 2025
Pihak Kesatu,

MUHAMAD NURUL KARIM, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19840522 201503 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FRANSISKUS XAVERIUS HERIYANTO, SH**

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU,**

Nama : **JOHANES BERKHMANS CHRISTOFORUS PUTU BOTHA, S.T.**

Jabatan : Plt.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Maumere, 3 November 2025
Pihak Kesatu,

JOHANES B. C. PUTU BOTHA, S.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19741115 200012 1 005

FRANSISKUS X. HERIYANTO, SH.

Pembina, IV a
NIP. 19811221 200604 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNTUK ADMINISTRATOR (ESELON III) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana	140,81	Program Penanggulangan Bencana	103.770.000	156.823.100	APBD
		Potensi Penduduk Terpapar	34,092				
		Potensi Kerugian Ekonomi	1.000.000.000				
		Potensi Kerugian Fisik	1.000.000.000				
		Potensi Kerugian Lingkungan	100				
		Indeks Ketahanan Daerah	0,44				
		Indeks Risiko Bencana	140,81				

Maumere, 3 November 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

JOHANES B. C. PUTU BOTHA, S.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741115 200012 1 005

FRANSISKUS X. HERIYANTO, SH.
Pembina
NIP.19811221 200604 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EMANUEL YOSEF MUDA, SH**

Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama : **JOHANES BERKHMANS CHRISTOFORUS PUTU BOTHA, S.T.**

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KESATU akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Maumere, 3 November 2025
PIHAK KESATU,

JOHANES B. C. PUTU BOTHA, S.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19741115 200012 1 005

EMANUEL YOSEF MUDA, SH

Pembina
NIP.19721211 200312 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNTUK ADMINISTRATOR (ESELON III) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana	140,81	Program Penanggulangan Bencana	321.906.200	271.328.100	APBD
		Potensi Penduduk Terpapar	34,092				
		Potensi Kerugian Ekonomi	1.000.000.000				
		Potensi Kerugian Fisik	1.000.000.000				
		Potensi Kerugian Lingkungan	100				
		Indeks Ketahanan Daerah	0,44				

Pihak Kedua,

JOHANES B. C. PUTU BOTHA, S.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741115 200012 1 005

Maumere, 3 November 2025

Pihak Kesatu,

EMMANUEL YOSEF MUDA, SH
Pembina
NIP.19721211 200312 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KORNELIA STEFANIA ALUR, SP**

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : **JOHANES BERKHMANS CHRISTOFORUS PUTU BOTHA, S.T.**

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

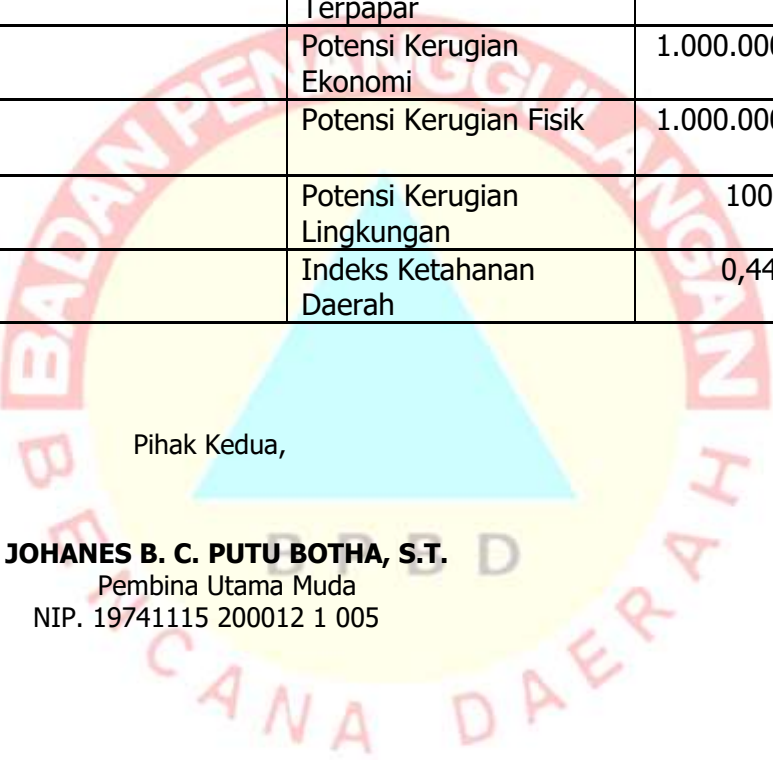
JOHANES B. C. PUTU BOTHA, S.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741115 200012 1 005

Maumere, 3 November 2025
PIHAK KESATU,

KORNELIA STEFANIA ALUR, SP
Pembina
NIP. 19730716 200003 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNTUK ADMINISTRATOR (ESELON III) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	PRORAM	ANGGARAN		KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana	140,81	Program Penanggulan gan Bencana	131.722.500	88.178.200	APBD
		Potensi Penduduk Terpapar	34,092				
		Potensi Kerugian Ekonomi	1.000.000.000				
		Potensi Kerugian Fisik	1.000.000.000				
		Potensi Kerugian Lingkungan	100				
		Indeks Ketahanan Daerah	0,44				



Pihak Kedua,

JOHANES B. C. PUTU BOTH A, S.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19741115 200012 1 005

Maumere, 3 November 2025

Pihak Kesatu,

KORNELIA STEFANIA ALUR, SP
Pembina
NIP. 19730716 200003 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARNOLDUS MISENTI, SE**

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **MUHAMAD NURUL KARIM, SH**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 3 November 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

MUHAMAD NURUL KARIM, SH

Penata Tingkat I

NIP.19840522 201503 1 002

ARNOLDUS MISENTI, SE

Penata

NIP.19761115 200801 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersedia	6 Dokumen	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	19.851.400	19.373.200	APBD

Pihak Kedua,

MUHAMAD NURUL KARIM, SH
NIP.19840522 201503 1 002



Maumere, 3 November 2025
Pihak Kesatu,

ARNOLDUS MISENTI, SE
NIP.19761115 200801 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CHRISTINA CRESENSIA SUSTANTY**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : **MUHAMAD NURUL KARIM, SH**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 3 November 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

MUHAMAD NURUL KARIM, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19840522 201503 1 002

CHRISTINA CRESENSIA SUSTANTY

Penata Tingkat I

NIP. 19701211 199311 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNTUK PENGAWAS (ESELON IV) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat daerah	Prosentase Administrasi Umum perangkat Daerah	100	Administrasi Umum Perangkat daerah	195.679.500	133.513.500	APBD
2	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.445.796	92.434.848	APBD
3	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	445.181.880	387.625.580	APBD

Pihak Kedua,

MUHAMAD NURUL KARIM, SH

NIP. 19840522 201503 1 002

Maumere, 3 November 2025

Pihak Kesatu,

CHRISTINA CRESESIA SUSTANTY

NIP. 19701211 199311 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **STEFANUS DUPRILUS PATRISIUS, A.Md**

Jabatan : Pengolah Data Dan Informasi

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

Nama : **CHRISTIANA CRESENSIA SUSTANTY**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 3 November 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

CHRISTIANA CRESENSIA SUSTANTY

NIP. 19701211 199311 2 001

STEFANUS DUPRILUS PATRISIUS, A.Md

NIP. 19700402 200901 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNTUK PENGADMINISTRASI PERKANTORAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
SIKKA

NO	KEGIATAN	KOMPONEN KEGIATAN	SATUAN
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan

Pihak Kedua,

Maumere, 3 November 2025

Pihak Kesatu,

STEFANUS DUPRILUS PATRISIUS, A.Md
NIP. 19700402 200901 1 003

CHRISTIANA CRESENSIA SUSTANTY
NIP. 19701211 199311 2 001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **GERIVANUS BUDIONO**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : **CHRISTIANA CRESENSIA SUSTANTY**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 3 November 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

CHRISTIANA CRESENSIA SUSTANTY
NIP. 19701211 199311 2 001

GERIVANUS BUDIONO
NIP. 19810308 200901 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNTUK PENGADMINISTRASI PERKANTORAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIKKA

NO	KEGIATAN	KOMPONEN KEGIATAN	SATUAN
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan

Pihak Kedua,

Maumere, 3 November 2025

Pihak Kesatu,

CHRISTIANA CRESENSIA SUSTANTY

NIP. 19701211 199311 2 001

GERIVANUS BUDIONO

NIP. 19810308 200901 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YOHANISTA MARGARETHA MEDO**

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

Nama : **MUHAMAD NURUL KARIM, SH**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 3 November 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK KEDUA,

MUHAMAD NURUL KARIM, SH
NIP. 19840522 201503 1 002

YOHANISTA MARGARETHA MEDO
NIP.19750527 200312 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNTUK PENGADMINISTRAS PERKANTORAN / PENGURUS BARANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	KEGIATAN	KOMPONEN KEGIATAN	SATUAN
1	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan Meubeler dan Peralatan Mesin Lainnya	unit
2	Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit

Maumere, 3 November 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

MUHAMAD NURUL KARIM, SH
NIP. 19840522 201503 1 002

YOHANISTA.M.MEDO
NIP.19750527 200312 2 004





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARIA RENSIANA EMA**

Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan / Bendahara

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

Nama : **MUHAMAD NURUL KARIM, SH**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 3 November 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

MUHAMAD NURUL KARIM, SH
NIP. 19840522 201503 1 002

MARIA RENSIANA EMA
NIP. 19791226 201406 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNTUK PENELAAH TEKNIS KEGIATAN / BENDAHARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIKKA

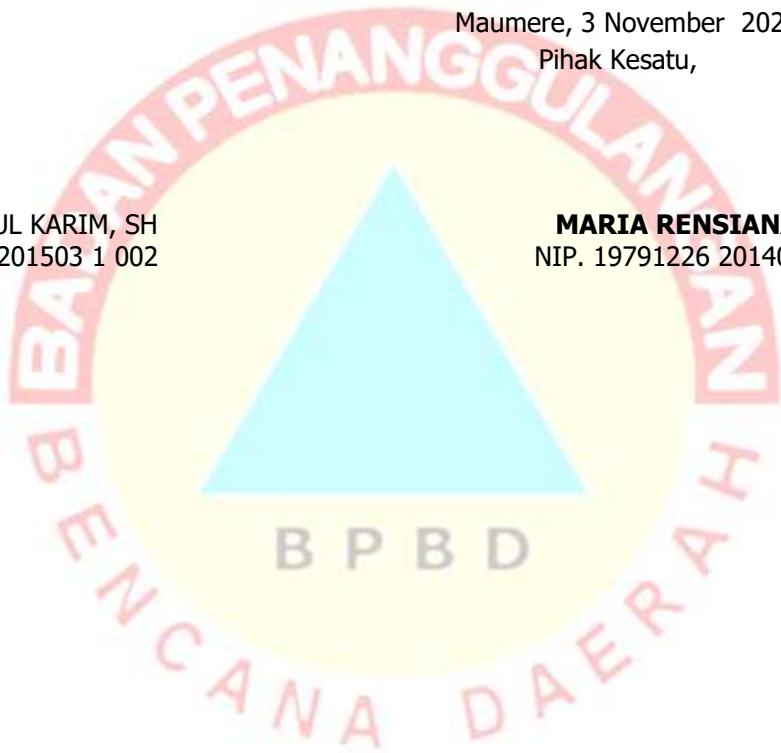
NO	KEGIATAN	KOMPONEN KEGIATAN	SATUAN
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan gaji dan Tunjangan	Bulan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Bulan

Pihak Kedua,

Maumere, 3 November 2025
Pihak Kesatu,

MUHAMAD NURUL KARIM, SH
NIP. 19840522 201503 1 002

MARIA RENSIANA EMA
NIP. 19791226 201406 2 008





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **OKTAVIA DAVEMI, A.Md.**

Jabatan : Pranata Komputer / Pembantu Bendahara Pengeluaran

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

Nama : **ARNOLDUS MISENTI, SE**

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

ARNOLDUS MISENTI, SE

NIP. 19761115 200801 1 012

Maumere, 3 November 2025

PIHAK KESATU,

OKTAVIA DAVEMI,A.Md.

NIP. 19821027 202321 2 023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNTUK PENGELOLA DATA DAN INFORMASI / PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	KEGIATAN	KOMPONEN KEGIATAN	SATUAN
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen

Pihak Kedua,

OKTAVIA DAVEMI, A.Md.
NIP. 19821027 202321 2 023

Maumere, 3 November 2025
Pihak Kesatu,

ARNOLDUS MISENTI, SE
NIP. 19761115 200801 1 012





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARNOLDUS YANSEN, SE**
Jabatan : Analisis Kebencanaan Ahli Muda
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU,**

Nama : **FRANSISKUS XAVERIUS HERIYANTO, SH**
Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA,**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Maumere, 3 November 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

FRANSISKUS X. HERIYANTO, SH
NIP.19811221 200604 1 010

ARNOLDUS YANSEN, SE
NIP. 19671108 199003 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS KEBENCANAAN AHLI MUDA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Warga yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	103.770.000	61.562.600	APBD

Pihak Kedua,

FRANSISKUS X. HERIYANTO, SH
NIP.19811221 200604 1 010



Maumere, 3 November 2025
Pihak Kesatu,

ARNOLDUS YANSEN, SE
NIP. 19671108 199003 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HUSNI ABDUL KADIR, ST**

Jabatan : Analisis Kebencanaan Ahli Muda

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **FRANSISKUS X. HERIYANTO, SH**

Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Maumere, 3 November 2025
Pihak Kesatu,

FRANSISKUS X. HERIYANTO, SH
NIP. 19811221 200604 1 010

HUSNI ABDUL KADIR, ST
NIP. 19740626 199903 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS KEBENCANAAN AHLI MUDA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Warga yang Memperoleh Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	103.770.000	61.562.600	APBD

Pihak Kedua,

FRANSISKUS X. HERIYANTO, SH
NIP. 19811221 200604 1 010



Maumere, 3 November 2025
Pihak Kesatu,

HUSNI ABDUL KADIR, ST
NIP. 19740626 199903 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DAMIANUS LEANDER**

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **HUSNI ABDUL KADIR, ST**

Jabatan : Analisis Kebencanaan Ahli Muda

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

HUSNI ABDUL KADIR, ST
NIP. 19740626 199903 1 010

Maumere, 3 November 2025
PIHAK KESATU,

DAMIANUS LEANDER
NIP. 19710221 200701 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNTUK FUNGSIONAL UMUM PENGADMINIRASI PERKANTORAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	KEGIATAN	KOMPONEN KEGIATAN	SATUAN
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Desa Tangguh Bencana	Desa

PIHAK KEDUA,

HUSNI ABDUL KADIR, ST
NIP. 19740626 199903 1 010

Maumere, 3 November 2025
PIHAK KESATU,

DAMIANUS LEANDER
NIP. 19710221 200701 1 019





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARIA SETIA**

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : **HUSNI ABDUL KADIR, ST**

Jabatan : Analisis Kebencanaan Ahli Muda

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

HUSNI ABDUL KADIR, ST
NIP. 19740626 199903 1 010

Maumere, 3 November 2025

PIHAK KESATU,

MARIA SETIA
NIP. 19750527 200312 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNTUK FUNGSIONAL UMUM PENGADMINIRASI PERKANTORAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	KEGIATAN	KOMPONEN KEGIATAN	SATUAN
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Satuan Pendidikan Aman Bencana	Satuan Pendidikan

PIHAK KEDUA,

Maumere, 3 November 2025
PIHAK KESATU,

HUSNI ABDUL KADIR, ST
NIP. 19740626 199903 1 010

MARIA SETIA
NIP. 19750527 200312 2 004





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YULLENS SISWANTO, A.Md**

Jabatan : Penata Penanggulangan Ahli Muda

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,

Nama : **EMMANUEL YOSEF MUDA, SH**

Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Maumere, 3 November 2025
PIHAK KESATU,

EMMANUEL YOSEF MUDA, SH
NIP.19721211 200312 1 004

YULLENS SISWANTO, A.Md
NIP. 19770730 200212 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga yang Memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	321.906.200	271.328.100	APBD

Pihak Kedua,

EMMANUEL YOSEF MUDA, SH
NIP.19721211 200312 1 004



Maumere, 3 November 2025
Pihak Kesatu,

YULENS SISWANTO, A.Md
NIP. 19770730 200212 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NIKOLAUS NOFERUS**
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : **YULLENS SISWANTO, A.Md**
Jabatan : Penata Penanggulangan Ahli Muda

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

YULLENS SISWANTO, A.Md
NIP. 19770730 200212 1 005

Maumere, 3 November 2025
PIHAK KESATU,

NIKOLAUS NOFERUS
NIP 19730915 200801 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
FUNGSIONAL UMUM PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	KEGIATAN	KOMPONEN KEGIATAN	SATUAN
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Dokumen

Maumere, 3 November 2025

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

YULENS SISWANTO, A.Md
NIP.19770730 200212 1 005

NIKOLAUS NOFERUS
NIP 19730915 200801 1 008





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VINCENTIUS NONG VIRBEN**

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : **YULLENS SISWANTO, A.Md**

Jabatan : Penata Penanggulangan Ahli Muda

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Maumere, 3 November 2025

Pihak Kedua,

YULLENS SISWANTO, A.Md
NIP.19770730 200212 1 005

VINCENTIUS NONG VIRBEN
NIP.19851014 200901 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
FUNGSIONAL UMUM PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	KEGIATAN	KOMPONEN KEGIATAN	SATUAN
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik dan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten / Kota	Jiwa

Maumere, 3 November 2025
Pihak Kesatu

Pihak Kedua,

YULENS SISWANTO, A.Md
NIP.19770730 200212 1 005

VINCENTIUS NONG VIRBEN
NIP.19851014 200901 1 004





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YOVITA DUA LERO, SE**

Jabatan : Perencana Ahli Pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : **YULLENS SISWANTO, A.Md**

Jabatan : Penata Penanggulangan Ahli Muda

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Maumere, 3 November 2025

PIHAK KESATU,

YULLENS SISWANTO, A.Md
NIP.19770730 200212 1 005

YOVITA DUA LERO, SE
NIP. 19830214 201001 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
FUNGSIONAL UMUM PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	KEGIATAN	KOMPONEN KEGIATAN	SATUAN
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penyediaan Logistik dan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten / Kota	Jiwa

Pihak Kedua,

YULENS SISWANTO, A.Md
NIP.19770730 200212 1 005

Maumere, 3 November 2025
Pihak Kesatu,

YOVITA DUA LERO, SE
NIP. 19830214 201001 2 011





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **VINSENSIA KONSTANSA DUA MEONG, SM**

Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama : **KORNELIA STEFANIA ALUR, SP**

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang akan diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Maumere, 3 November 2025
Pihak Kesatu,

KORNELIA STEFANIA ALUR, SP
NIP. 19730716 200003 2 008

VINSENSIA K. DUA MEONG, SM
NIP. 197404051993032006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	Terlaksananya Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga yang memperoleh penanganan pasca bencana	4.548	Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana	131.722.500	88.178.200	APBD



Maumere, 3 November 2025
Pihak Kesatu,

VIENSIA KONSTANSA DUA MEONG, SM
NIP. 197404051993032006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MARIA SELVITA YUNITA, SE**
Jabatan : Penata Penanggulangan Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : **KORNELIA STEFANIA ALUR, SP**
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Maumere, 3 November 2025
Pihak Kesatu,

KORNELIA STEFANIA ALUR, SP
NIP. 19730716 200003 2 008

MARIA SELVITA YUNITA, SE
NIP. 19830602 201101 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA
Penata Penanggulangan Ahli Muda

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN		KETERANGAN
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
1	Terlaksananya Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen R3P Kabupaten	1	Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana	131.722.500	88.178.200	APBD

Pihak Kedua,

KORNELIA STEFANIA ALUR, SP
NIP. 19730716 200003 2 008



Maumere, 3 November 2025
Pihak Kesatu,

MARIA SELVITA YUNITA, SE
NIP. 19830602 201101 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALFRIDUS**

Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : **VISENSIA KONSTANSA DUA MEONG, SM**

Jabatan : Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Maumere, 3 November 2025
Pihak Kesatu,

VISENSIA K. DUA MEONG, SM
NIP. 197404051993032006

ALFRIDUS
NIP. 19710807 199203 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
FUNGSIONAL UMUM PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	KEGIATAN	KOMPONEN KEGIATAN	SATUAN
1	Koordinasi penanganan pascabencana Kabupaten / Kota	Dokumen Rehab Rekon Kabupaten	Dokumen

Pihak Kedua,

Maumere, 3 November 2025
Pihak Kesatu,

VISENSIA K. DUA MEONG, SM
NIP. 197404051993032006

ALFRIDUS
NIP. 19710807 199203 1 008



REALISASI RENCANA AKSI TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sasaran		Target Thn 2025	Realisasi Target				Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)				Penan ggung Jawab	Realisasi Jadwal Pelaksanaan Triwulan				Ket .
Uraian	Indik ator Kinerj a		I	II	III	IV			I	II	III	IV		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana	140,81				180,09												
	Potensi Penduduk Terpapar	34.092,0				6.892												
	Potensi Kerugian Ekonomi	1.000.000.000				32.882.745.000												

	Poten si Kerugi an Fisik	1.000.0 00.000				90.018.1 70.000													
	Poten si Kerugi an Lingk ungan	100				30													
	Indeks Ketah anan Daera h	0,44				0,55													
Mening katnya kapasit as dan akuntab ilitas anggar an serta kinerja Perang kat Daerah	Nilai SAKIP Peran gkat Daera h (Angk a)	72,5				-													
							Program Penanggul angan Bencana	516.329.4 00	12.270.00 0,00	74.542.50 0,00	56.677.44 1,00	264.080.5 83	BPBD						
							Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	156.823.1 00	-	920.000	46.550.00 0	73.184.29 6							

						Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/ Kota	95.260.500	-	-	-	71.855.876	BPBD					
						Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	61.562.600	-	920.000	46.550.000	1.328.420	BPBD					
						Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	271.328.100	12.270.000	73.122.500	1.927.441	111.802.087						
						Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	198.073.700	12.270.000	73.122.500	1.927.441	84.839.416	BPBD					

						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/Kota	73.254.400	-	-	-	26.962.671	BPBD					
						Penataan Sitem dasar Penanggulangan Bencana	88.178.200	-	500.000	8.200.000	79.094.200	BPBD					
						Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	88.178.200	-	500.000	8.200.000	79.094.200	BPBD					
						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.599.047.019	739.405.266	567.480.016	193.888.054	832.178.290	BPBD					
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.373.200	4.002.000	-	3.977.450	15.324.200	BPBD					



						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.373.200	4.002.000	-	3.977.450	15.324.200	BPBD					
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	1.951.761.091	602.024.065	480.711.032	144.511.725	520.367.389	BPBD					
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.877.073.091	581.554.065	464.676.032	139.642.725	487.055.389	BPBD					
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	74.688.000	20.470.000	16.035.000	4.869.000	33.312.000	BPBD					
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.513.500	9.740.000	4.459.000	2.495.000	114.909.239	BPBD					
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.712.700	-	-	-	1.199.000	BPBD					

						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.584.600	-	-	-	7.402.550	BPBD					
						Penyediaan bahan logistik kantor	10.500.000	2.070.000	1.875.000	2.495.000	4.030.000	BPBD					
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Ceta dan Penggandaan	6.751.200	-	2.584.000	-	4.167.200	BPBD					
						Sub Kegiatan Penyediaan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.965.000	7.670.000	-	-	98.110.489	BPBD					
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	14.338.800	-	-	-	14.102.550	BPBD					
						Pengadaan mebel	-	-	-	-	-						



						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.338.800	-	-	-	14.102.550					
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.434.848	15.685.537	10.223.557	7.239.809	37.469.819	BPBD				
						Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.944.860	6.548.741	3.370.960	4.613.610	34.453.120	BPBD				
						Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.489.988	9.136.796	6.852.597	2.626.199	3.016.699	BPBD				
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.625.580	107.953.664	72.086.427	35.664.070	130.005.093	BPBD				
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	378.025.580	107.428.664	71.786.427	35.414.070	126.375.093	BPBD				

							Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
							Pemeliharaan n Peralatan Mesin Lainnya	9.600.000	525.000	300.000	250.000	3.630.000	BPBD						
							Pemeliharaan n Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	BPBD						



Maumere, 20 Februari 2026
 Plt. Kepala Pelaksana BPBD
 Kabupaten Sikka

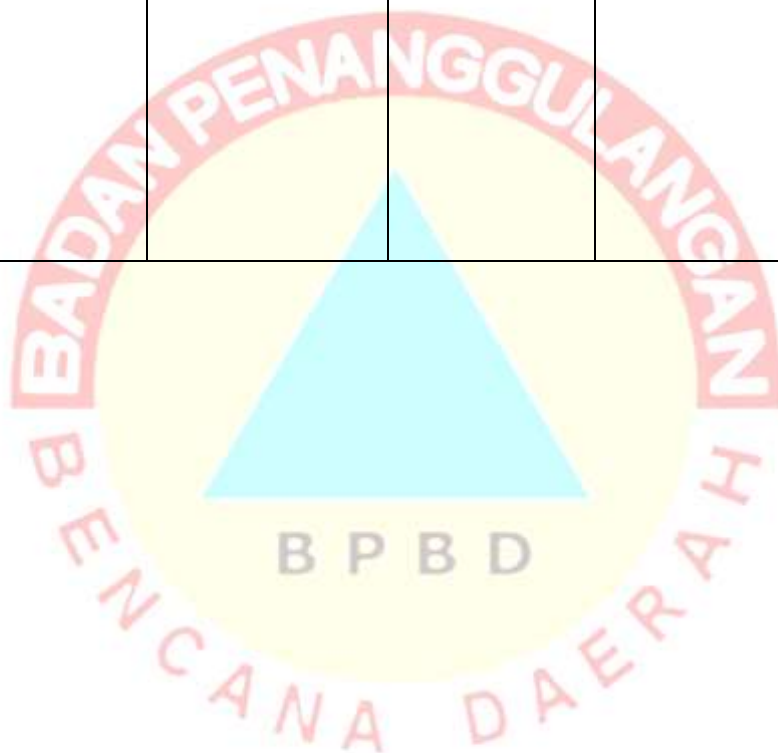
[Signature]
PETRUS POLING WAIRMAHING, ST.MT.M.Sc
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690923 199903 1 007

3. Pengukuran BPBD Capaian Kinerja Utama

PENGUKUR CAPAIAN KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025

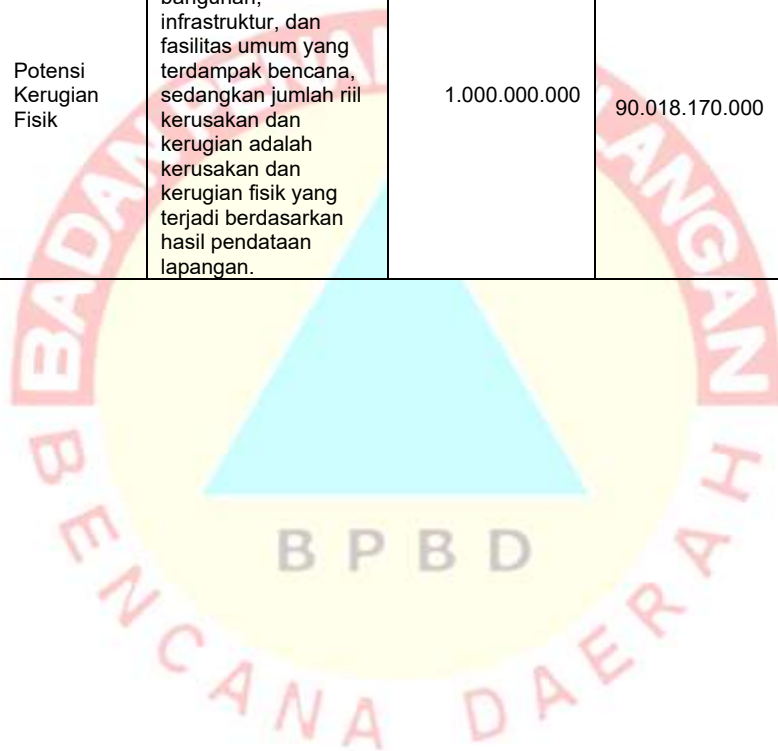
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN		
							PAGU	REALISASI	CAPAIAH(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana	Perbandingan antara jumlah penduduk terpaIndek Risiko Bencana merupakan perangkat analisis berbasis data yang mengukur tingkat risiko bencana (rendah, sedang, tinggi) di suatu wilayah, biasanya per kabupaten/kota atau provinsi. Cara perhitungan indeks risiko bencana dapat dilakukan dengan formulasi rumus sebagai berikut: $R = \frac{H \times V}{C}$ dimana : C : Tingkat Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Menghadapi H : Kemungkinan Kejadian dan Besaran Dampak yang Timbul; V : Tingkat Kerentanan pada suatu wilayah tertentu;	140,81	180,09	127,89	Penanggulangan Bencana	516.329.400	407.570.524	78,94

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN		
							PAGU	REALISASI	CAPAIAH(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bencana.par bencana dengan jumlah keseluruhan penduduk di daerah rawan bencana							



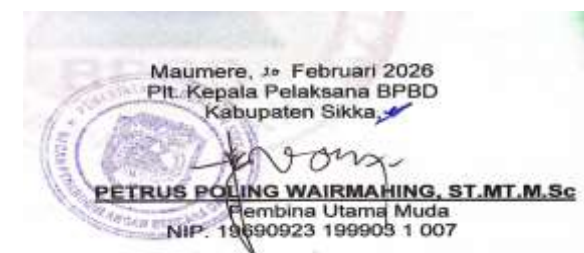
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN		
							PAGU	REALISASI	CAPAIAH(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Potensi Penduduk Terpapar	Jumlah penduduk terpapar bencana dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang berada di wilayah rawan bencana sesuai tingkat kerawannya. Perhitungan dilakukan dengan mengintegrasikan data kependudukan dan peta kawasan rawan bencana, sehingga diperoleh total penduduk yang berpotensi terdampak sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana.	34,092	6.892	20,21				
	Potensi Kerugian Ekonomi	Potensi kerugian ekonomi merupakan nilai kerugian ekonomi yang akan timbul akibat terjadinya bencana, sedangkan jumlah riil kerusakan dan kerugian merupakan nilai kerusakan dan kerugian yang terjadi berdasarkan hasil pendataan pascabencana. Data ini digunakan sebagai dasar evaluasi dampak bencana serta perencanaan	1.000.000.000	32.882.745.000	3,28				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN		
							PAGU	REALISASI	CAPAIA N(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		penanggulangan, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara tepat sasaran.							
	Potensi Kerugian Fisik	Potensi kerugian fisik merupakan kondisi kerusakan pada bangunan, infrastruktur, dan fasilitas umum yang terdampak bencana, sedangkan jumlah riil kerusakan dan kerugian adalah kerusakan dan kerugian fisik yang terjadi berdasarkan hasil pendataan lapangan.	1.000.000.000	90.018.170.000	9,00				



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN		
							PAGU	REALISASI	CAPAIAH(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Potensi Kerugian Lingkungan	Potensi kerugian lingkungan menggambarkan dampak bencana terhadap kondisi lingkungan hidup, termasuk kerusakan ekosistem, sumber daya alam, dan penurunan kualitas lingkungan. Sementara itu, jumlah riil kerusakan dan kerugian menunjukkan kerusakan dan kerugian lingkungan yang terjadi berdasarkan hasil inventarisasi dan pendataan di lapangan,	100	30	30				
	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah merupakan ukuran tingkat kemampuan daerah dalam mengantisipasi, menghadapi, dan memulihkan dampak bencana, yang tercermin dari kondisi kerusakan dan kerugian yang terjadi. Jumlah riil kerusakan dan kerugian digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat ketahanan daerah serta menjadi dasar	0,44	0,55	1,25				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM	ANGGARAN		
							PAGU	REALISASI	CAPAIAH(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dalam perencanaan peningkatan kapasitas dan pengurangan risiko bencana.							
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat pada setiap perangkat daerah	72,5	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota	2.599.047.019	2.328.974.176	89,61



4. Rencana Aksi Atas PK Tahun 2025

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Kegiatan	Hasil yang akan dicapai				Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		I	II	III	IV		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Resiko Bencana				140,81	Program Penanggulangan Bencana				180,09	129.082.350	129.082.350	129.082.350	129.082.350	
	Potensi Penduduk Terpapar				34,092	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota					39.205.775	39.205.775	39.205.775	39.205.775	
	Potensi kerugian :					Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/ Kota		1 Dokumen			23.815.125	23.815.125	23.815.125	23.815.125	BPBD

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Kegiatan	Hasil yang akan dicapai				Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		I	I	I	IV		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	a. Fisik				1.000.000.000	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	15.390.650	15.390.650	15.390.650	15.390.650	BPBD
	b. Ekonomi				1.000.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					67.832.025	67.832.025	67.832.025	67.832.025	
	Lingkungan				100	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok		1 Dok	49.518.425	49.518.425	49.518.425	49.518.425	BPBD
	Indeks Ketahanan Daerah				0,44	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana kabupaten/Kota	25 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	18.313.600	18.313.600	18.313.600	18.313.600	BPBD

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Kegiatan	Hasil yang akan dicapai				Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		I	I	I	IV		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Penataan Sistim dasar Penanggulangan Bencana					22.044.550	22.044.550	22.044.550	22.044.550	
						Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	22.044.550	22.044.550	22.044.550	22.044.550	BPBD
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah				72,5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					649.761.755	649.761.755	649.761.755	649.761.755	2.599.047.020
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4.843.300	4.843.300	4.843.300	4.843.300	19.373.200

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Kegiatan	Hasil yang akan dicapai				Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		I	II	III	IV		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	2 Dok		4.843.300	4.843.300	4.843.300	4.843.300	BPBD
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah					487.940.273	487.940.273	487.940.273	487.940.273	1.951.761.092
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	469.268.273	469.268.273	469.268.273	469.268.273	BPBD
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	18.672.000	18.672.000	18.672.000	18.672.000	BPBD
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					33.378.375	33.378.375	33.378.375	33.378.375	133.513.500
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		1 Paket			428.175	428.175	428.175	428.175	BPBD

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Kegiatan	Hasil yang akan dicapai				Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		I	I	I	IV		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	1.896.150	1.896.150	1.896.150	1.896.150	BPBD
						Penyediaan bahan logistik kantor	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	BPBD
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1 Paket		1.687.800	1.687.800	1.687.800	1.687.800	BPBD
						Sub Kegiatan Penyediaan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	26.741.250	26.741.250	26.741.250	26.741.250	BPBD
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah					3.584.700	3.584.700	3.584.700	3.584.700	14.338.800
						Pengadaan mebel		2 Unit	2 Unit		-	-	-	-	BPBD
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3.584.700	3.584.700	3.584.700	3.584.700	

Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Kegiatan	Hasil yang akan dicapai				Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		I	I	I	IV		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					23.108.712	23.108.712	23.108.712	23.108.712	92.434.848
						Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	15.986.215	15.986.215	15.986.215	15.986.215	BPBD
						Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	7.122.497	7.122.497	7.122.497	7.122.497	BPBD
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					96.906.395	96.906.395	96.906.395	96.906.395	387.625.580
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1 Unit	94.506.395	94.506.395	94.506.395	94.506.395	BPBD



Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Kegiatan	Hasil yang akan dicapai				Anggaran (Rp)				Penanggung Jawab
		I	II	III	IV		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1 Bulan	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	BPBD
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya				1 unit	-	-	-	-	BPBD



Maumere, 30 Februari 2026
 Ptl. Kepala Pelaksana BPBD
 Kabupaten Sikka

[Signature]
PETRUS POLING WAIRMAHING, ST.MT.M.Sc
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690923 199903 1 007